



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN KEPALA BMKG DAN KEPALA BNPP (BASARNAS)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
Waktu : Pukul 13.17 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI;
2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
35 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
9 dari 11 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Sukur H. Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. Sri Rahayu
8. H. Irmadi Lubis
9. Ir. Effendi Sianipar
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
2. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
4. Bambang Hermanto, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
 1. Sudewo, S.T., M.T.
 2. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. Sofyan Ali, S.H.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik, S.Sos.
 3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Athari Ghauthi Ardi
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. H. Boyman Harun, S.H.
 4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Kepala BMKG (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.)
2. Kepala BNPP/BASARNAS (Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, M.Han.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Demikian, yang saya hormati.

Segera mulai rapat kita yang tertunda ini harusnya tadi pagi tapi karena DPR ada Paripurna, maka kita mundurkan ke jam 1, sekarang sudah jam 13.17 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
Saudara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali rapat pada rapat kita pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rapat pada siang hari ini sesuai jadwal yang sudah kita sampaikan.

Sebelum dilanjutkan perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bagi Saudara-Saudari yang merayakan Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan perpindahan Anggota Komisi V DPR RI. Dari Fraksi Partai Golkar, berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Partai Golkar, tanggal 17 Mei 2022, Saudara Ir. H. Anang Susanto, M.Si. Nomor Anggota 288, daerah pemilihan Jawa Barat II menggantikan Saudara Muhammad Fauzi, S.H., M.H., pindah ke Komisi VII.

Menurut laporan dari Sekretariat, rapat hari ini dihadiri oleh 28 orang Anggota dari 9 unsur Fraksi yang berbeda. Dengan 13 orang hadir secara fisik dan 15 orang hadir secara *virtual*. Maka, sesuai ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat 1, Rapat Komisi V DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.17 WIB)

Terima kasih, dan penghargaan kami sampaikan kepada Sauda Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas beserta seluruh jajaran dan undangan yang telah hadir secara fisik pada siang hari ini.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, RDP pada hari ini diagendakan acara penyampaian hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dilaksanakan dari Masa Persidangan I sampai Masa Persidangan ke-4 Tahun Sidang 2021/2022 baik kunjungan kerja spesifik maupun kunjungan kerja pada masa reses, serta membahas pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan RKP dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan lain-lain hal yang dipandang perlu.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Kepala BMKG dan Kepala Basarnas yang kami hormati atau Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.**

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 beserta dengan, bersama dengan kementerian atau lembaga mitra kerja Komisi V yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk di sinkronisasi pada tanggal 10 Juni yang akan datang.

Terkait dengan RKP dan pembicara pendahuluan RAPBN Tahun 2023, Pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023. Tema rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 atau Covid-19.

Selanjutnya, Pagu Indikatif BMKG Tahun 2023 adalah sebesar 33,01 Triliun, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta dukungan manajemen. Sementara Pagu Indikatif Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tahun 2023 adalah sebesar 1,75 Triliun, yang diperuntukan untuk program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana serta dukungan manajemen.

Pada kesempatan di DPR ini, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terkait dengan pembicaraan pendahuluan RK K/L dan RKP dalam RAPBN Tahun 2023 untuk masing-masing badan tersebut.

Bapak Ibu sekalian,

Badan Anggaran telah memberi batas waktu kepada kita yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni. Oleh karenanya, tanggal 10 Juni itu adalah hasil pembahasan antara Komisi dengan mitra kerja termasuk yang kita laksanakan pada hari ini. Nanti, kesimpulan rapatnya akan kita sampaikan kepada Badan Anggaran tanggal 10 Juni yang akan datang. Oleh karenanya, kami harapkan nanti dalam penjelasan ini betul-betul dapat disampaikan kepada kami, ya, dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan juga BMKG terkait dengan skala prioritas untuk RKP Tahun 2023.

Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan lebih dahulu kepada Kepala BMKG untuk menyampaikan paparannya, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Kepala Badan Nasional dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, saya persilakan, Ibu Kepala BMKG.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI.

Bismillahirrahmanirrahim.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI, beserta
Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, juga
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan beserta seluruh jajarannya, dan juga
Yang saya banggakan jajaran rekan-rekan dari civitas BMKG, serta
Bapak Ibu hadirin sekalian.**

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang salam sejahtera.***

Sekali lagi mengingat saat ini masih dalam suasana bulan Syawal, maka perkenankan kami atas nama keluarga besar BMKG kami menyampaikan selamat Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir dan Batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami dan terima kasih atas seluruh dukungan, arahan, dan bimbingan dari Komisi V untuk kami terus maju dan meningkatkan kinerja.

Terkait dengan pembahasan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, izin kami sekilas menunjukkan pada *slide* nomor 4. Terlihat di situ seperti halnya tahun-tahun sebelumnya dalam RKP Tahun 2023 dengan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan Pemerintah yang didukung oleh BMKG terutama dalam hal pembangunan rendah karbon, transisi energi, dan respon terhadap perubahan iklim.

Selain itu juga dukungan BMKG, peran BMKG penting dalam pembangunan Ibukota Negara. Terkait dengan prioritas nasional seperti halnya tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, BMKG mendukung pada prioritas nasional nomor 6, yaitu terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup,

kemudian peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Slide selanjutnya nomor 6, izin kami sampaikan beberapa sasaran utama bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dalam rancangan awal RKP 2023 ini ada beberapa sasaran indikator dan target untuk 3 tahun terakhir termasuk tahun, maaf 2 tahun terakhir dan target Tahun 2023. Untuk indikator kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, Tahun 2023 kami menetapkan target 3,5 menit, yang 30 detik lebih cepat dari target Tahun 2022.

Kemudian untuk kelengkapan sistem peringatan dini kami tetapkan target 96% meningkat 2% dari tahun lalu dan untuk akurasi informasi meteorologi kami tetapkan 91%, kami berjuang agar tidak turun dari tahun lalu. Kemudian untuk informasi klimatologi akurasi kami tingkatkan 1% menjadi 83%. Kemudian isu strategis masih tetap kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi, serta perlunya pemenuhan layanan informasi yang prima dan penguatan, serta pengembangan infrastruktur peralatan operasional utama BMKG, serta kebutuhan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.

Kemudian, *slide* nomor 8 arah kebijakan, di sini ada 5 arah kebijakan yaitu mengoptimalkan *big data*, *artificial intelligence*, *implementation*, saya ulangi. Selain *big data* juga *artificial intelligence* serta *intelligence information system* 5.0., 5.0 ini bedanya dengan 4.0 tidak hanya berdasarkan *digital* apa data-data atau teknologi *digital*, namun terintegrasi dengan melibatkan masyarakat antara lain melalui respon-respon baik secara langsung ataupun secara *crowd* atau *digital*.

Kemudian juga kebijakan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan dan inovasi yang tidak pernah berakhir dan kebijakan pengembangan SDM Unggul, serta menyeimbangkan, ini yang sangat penting, yang tahun-tahun sebelumnya masih nyaris belum dilakukan yaitu menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab unit pusat dan daerah. Jadi lebih memberdayakan daerah, stasiun-stasiun di daerah, serta ini juga kami tekankan sekali lagi. Pengadaan yang transparan, bersih, dan berkualitas.

Kemudian, kebijakan pembangunannya di bidang meteorologi ini sudah kami cantumkan, mohon berkenan saya tidak membacakan semua. Namun semua di sini prinsipnya kebijakan itu adalah satu, mempertahankan operasional dengan standar indikator secara kuantitatif yaitu misalnya *service level agreement* minimum 97%, dan *operational level agreement* minimum 95%.

Artinya, seluruh pengadaan seluruh peralatan harus memenuhi target 97% minimal data harus masuk dan 95% dari data yang masuk minimal harus merupakan data yang *valid*. Nah, ini merupakan penetapan yang lebih ketat daripada tahun lalu, bahkan sepertinya tahun lalu kami tidak pernah menetapkan hal ini.

Kemudian, kedua adalah peningkatan pemahaman masyarakat. Target kumulatifnya adalah masyarakat minimal 75% memahami informasi yang kami sampaikan. Kemudian, meningkatkan akurasi prakiraan cuaca targetnya 91% dan indeks kepuasan masyarakat targetnya 3,8 dari 4 total kepuasan indeks kepuasan, serta target yang berikutnya adalah penyelesaian dan percepatan kegiatan-kegiatan yang bersumber pada pendanaan dari pinjaman luar negeri, antara lain SUS atau *Scaling Up System* terhadap sistem dari prakiraan cuaca baik publik ataupun maritim dan modernisasi meteorologi serta sistemnya, sistem observasi dan *processing*-nya, dan juga penguatan *flight information region* yang baru saja ini diserahkan dari Singapura ke Indonesia, jadi kami harus mengawal hal tersebut.

Untuk selanjutnya di bidang yang lain, kurang lebih sama target-targetnya, apa, terutama *standart level agreement* atau *service level agreement* atau mempertahankan operasional dan juga akurasi, kepuasan masyarakat, dan juga penyediaan proyeksi iklim resolusi tinggi, ini untuk bidang klimatologi, terutama penyediaan data proyeksi iklim resolusi tinggi melalui *down scalling* proyeksi iklim dengan skenario *shape socio-economic pathways*.

Kemudian juga pembangunan gas rumah, observasi gas rumah kaca ini sejalan dengan semangat COP26 dan juga semangat apa *Paris Agreement* untuk terus memitigasi dampak perubahan iklim global. Sehingga kami membangun sistem observasi gas rumah kaca yang terintegrasi dengan global *greenhouse glases information system*. Bidang geofisika juga masih kurang lebih terkait akurasi dan juga kecepatan.

Kemudian di bidang instrumentasi, terutama terkait terpeliharanya aloptama. Ini kami *setting* minimal 85% dari aloptama harus terpelihara untuk menjaga kinerja atau performa dari peralatan. Kemudian, juga penguatan sistem proteksi petir terpadu, ini mengingat beberapa kali ada kilang-kilang minyak yang apa, tersambar petir, terbakar dan ini mungkin juga dapat terjadi pada sistem operasional di BMKG sehingga penguatan sistem proteksi petir terpadu ini sangat diperlukan dan penguatan jaringan komunikasi terutama untuk kecepatan laju informasi yang disebarluaskan oleh BMKG dan kecepatan dalam perhitungan data.

Kemudian penguatan *processing data* dengan *hight performance computer* targetnya satu *petaflop* dan mempertahankan operasional harian terutama menjaga *performance* peralatan jaringan melalui kegiatan pemeliharaan. Bidang kesekretariat, kesekretariatan kebijakannya adalah meningkatkan profesionalisme SDM dalam penyelenggaraan layanan informasi MKG, kemudian perencanaan aloptama harus memiliki dasar berupa data kebutuhan ideal aloptama yang disetujui oleh level Eselon I dan disampaikan kepada Sestama.

Kemudian juga tentang spesifikasi teknis peralatan yang harus dijaga ketat agar tidak menurunkan performa dan HSP 2023 ke depan harus disusun berdasarkan RFI dari minimal penyedia. Jadi ini apa, semacam standar biaya ya, jadi kita dalam menetapkan biaya HPS itu juga harus berdasarkan standar yang ada di pasar. Kemudian, semua hasil temuan BPK harus menjadi

masukannya dasar penentuan spesifikasi teknis dan HSP selanjutnya. Nah, ini sangat penting sekali, apa yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

Kemudian, mohon kami izin melompat ke usulan anggaran BMKG. Dasar hukumnya tentunya surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kemudian, usulan anggaran, berdasarkan Renstra BMKG Tahun 2020-2024, Pagu Usulan Anggaran Tahun 2023 sebesar 3,398 Triliun dengan rincian, belanja operasional Rp.986,87 Miliar untuk belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, kemudian belanja operasional layanan perkantoran. Kemudian yang kedua untuk belanja non operasional sebesar 2,411 Triliun untuk memenuhi dukungan BMKG terhadap Prioritas Nasional 2023 dan belanja untuk prioritas lembaga, belanja barang dan belanja modal peralatan MKG di 195 Satker dan seterusnya, serta implementasi kerjasama dalam dan luar negeri.

Kemudian, alokasi tersebut juga untuk pemeliharaan peralatan MKG sesuai dengan Tusi MKG yaitu komponen 005. Untuk sasaran strategis dan target kinerja Renstra BMKG Tahun 2020 hingga 2024 apabila kita lihat di sini yang kolom kuning, di situ sasaran strategis yang pertama, terwujudnya layanan prima. Ini akurasi MKG kami set 89, ini merupakan angka rata-rata dari *slide* berikutnya.

Jadi akurasi itu bervariasi di dalam meteorologi berbeda dengan klimatologi berbeda juga dengan geofisika. Nah, di sini misalnya di *slide* berikutnya, akurasi untuk informasi meteorologi adalah 91% tetapi informasi klimatologi adalah 83% karena durasi atau periode untuk memprediksi itu jauh lebih panjang. Sehingga ketidakpastiannya lebih tinggi, maka berakibat akurasinya lebih rendah, akurasi informasi geofisika 91%.

Nah, ini semua kalau di rata-rata dijabarkan pada *slide* 17 di kolom kuning paling atas, informasi MKG total 89%. Kemudian, indeks kepuasan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan MKG 3,8, peningkatan pemahaman ini 45% mohon maaf 45% ini adalah peningkatannya, deltanya, untuk mewujudkan 75% tadi. Kemudian persentase kelengkapan sistem peringatan dini adalah 96%. Untuk sasaran strategis yang kedua, terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, nilai Kemenpan RB atas RB apa BMKG reformasi birokrasi di BMKG diharapkan meningkat dari 87 menjadi 91.

Slide berikutnya tadi sudah. Sekarang halaman 19, ini tadi sudah.

Di sini Pagu Indikatif BMKG Tahun 2023, apabila kita lihat Pagu Indikatif secara total adalah 3.010.572.747.000, ini dalam, ya, betul. Kemudian dari 3 Triliun tersebut alokasi untuk program dukungan manajemen adalah 1,3 kurang lebih Rp1,3 Triliun dan alokasi untuk program MKG kurang lebih Rp1,694 Triliun. Sumber dana untuk memenuhi, apa, Pagu tersebut berasal dari Rupiah murni sebesar 2,351 Triliun, dari PNBPN sebesar 66,759 Triliun, dari pinjaman luar negeri sebesar, oh

Mohon maaf, saya ulangi.

Dari PNBP sebesar 66,759 Miliar, dari pinjaman luar negeri kurang lebih sebesar 389 Miliar dan dari SBSN kurang lebih sebesar 202,585 Miliar. Pagu Indikatif ini sudah termasuk Belanja Operasional Pegawai komponen 001 sebesar Rp750,985 Miliar dan Belanja Operasional Barang komponen 002 sebesar Rp235,893 Miliar dan Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit komponen 005 sebesar 762,4 Miliar.

Kemudian Pagu kebutuhan sesuai Renstra dibandingkan dengan Pagu Indikatif BMKG pada *slide* ini terlihat bahwa Pagu kebutuhan Renstra untuk program MKG atau meterologi klimatologi dan geofisika sebesar 2,159 Triliun, itu kebutuhan sesuai Renstra. Namun Pagu Indikatif adalah 1,694 Triliun, artinya ada terjadi *backlog* sebesar 464,994 Miliar. Kemudian, untuk dukungan manajemen terjadi *backlog* sekitar, maaf bukan *backlog*, di sini iya di sini *backlog*, ya, malah penambahan.

Mohon maaf di sini malah dukungan manajemen mendapatkan penambahan sebesar 77,283 Miliar karena kebutuhan Renstra hanya 1,238 Triliun tapi di dalam Pagu Indikatif meningkat menjadi 1,315 Triliun. Sehingga total apabila kita bandingkan kebutuhan Renstra itu 3,398 Triliun dan Pagu Indikatif adalah 3,010 Triliun. Sehingga akumulatif terjadi *backlog* 387, sekitar 387 Miliar.

Nah, kemudian kalau kami lihat kita bandingkan sejak Tahun 2019, *backlog* kali ini relatif lebih rendah daripada *backlog* tahun-tahun sebelumnya sejak Tahun 2020.

Mohon izin, berikutnya belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit atau komponen 005 yang perlu kami sampaikan, di sini total berjumlah 762 miliar 423 ya, jadi 760 sekitar 762,4 Miliar. Nah, untuk kebutuhan komponen 005 ini terutama yang terbesar adalah pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa BMKG sebesar 286,7 Miliar dan pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp139,053 Miliar, karena memang di BMKG tugas utamanya adalah untuk menjaga kecepatan informasi dan ketepatan informasi. Sehingga alat-alatnya harus benar-benar per kalibrasi dan terpelihara terjaga.

Kemudian juga cukup besar di sini 96,678 Miliar, untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami. Untuk rincian prioritas nasional atau *major project*, tabel ini kami sajikan dalam Ribu Rupiah. Di sini *major project* yang terkait sumber dana dari pinjaman luar negeri, rencana *output* ya, Pak, oh rincian *output* ya. Rincian *output* pengembangan sistem *big data* melalui IDRIP, IDRIP adalah proyek *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project*.

Nah, di sini sesuai dengan surat bersama Menteri tadi, total Pagu nya adalah 459,997 Miliar. Namun BMKG mengusulkan ini karena *multiyears*, untuk Tahun 2023 kami akan memanfaatkan di bawah Pagu yaitu sekitar 389,4 Miliar, karena hal ini belajar dari pengalaman yang lalu, kami harus memastikan serapannya dan durasi waktu penyelesaiannya. Sehingga di sini ada beberapa penambahan tapi juga ada pengurangan, misalnya penambahan dari nomor A1 di situ untuk *big data* dari 21,6 Miliar menjadi 60,6.

Tetapi, oh iya, di sini menjadi lebih tinggi karena tidak hanya *big data* saja tetapi juga adanya pembelian *high performance computer* atau *super computer* melalui proyek IDRIP. Namun ada pengurangan dalam peralatan *monitoring* gempa bumi dan tsunami dari apa 87,7 Miliar menjadi 76,7 Miliar meskipun unitnya justru ditambah dan seterusnya.

Ini nomor 4 juga terjadi pengurangan yang sangat signifikan, peralatan *monitoring* dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dari 81 Miliar, ini, hanya menjadi 3,1 Miliar, dari unit 69 unit hanya menjadi 35 unit.

Kemudian, yang lain kurang lebih sama, ini ada penguatan layanan informasi meteorologi penerbangan dari 1 Miliar ini menjadi 500 Juta dan juga layanan peringatan dini cuaca, ini masih sama, kemudian layanan informasi meteorologi maritim masih sama. Jadi, tadi ada beberapa hal yang kami mengusulkan untuk dikurangi apa pencairan anggarannya.

Kemudian, rincian prioritas nasional *major project* untuk sumber dana Rupiah murni. Di sini Pagu Indikatifnya 891,169 Miliar, kami mengusulkan di bawah Pagu Indikatif yaitu maksudnya kita ambil apa kita akan ambil 700,324 Miliar. Jadi, namun di dalamnya kalau kita lihat justru terutama untuk sekolah lapang, baik sekolah lapang gempa bumi, sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca, ini terutama sekolah lapang gempa bumi, mohon maaf.

Di sini sekolah lapang gempa bumi, di sini justru targetnya kami lompatkan meskipun anggarannya sedikit berkurang tetapi kami memaksimalkan, oh maaf khusus untuk SLG justru anggarannya kami lompatkan iya khusus untuk SLG anggaran kami lompatkan dari 1,9 ini menjadi 2,7 dengan target 208 orang menjadi 2.880 orang, juga nomor 2 dan nomor 3 ini masih sekolah lapang, ini dibedakan di wilayah Barat, ini maksudnya Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur.

Di sini yang kami lompatkan adalah angkanya menjadi 10 kali lipat lebih dari yang ada di dalam Pagu Indikatif. Dari 228 di Indonesia bagian Tengah menjadi 2.620 dan anggarannya kami *double*-kan melompat juga dari 1,6 Miliar menjadi 2,4. Kemudian dari 156 orang target di Indonesia Timur menjadi 1.580 dengan anggaran kami lompatkan menjadi 2 Miliar lebih dari 1,1 Miliar.

Untuk yang lain kami kurangi, tentang layanan informasi gempa bumi ini jadi untuk melompatkan sekolah lapang kami ngurangi yang lain. Misalnya layanan informasi gempa bumi ini sedikit kami kurangi, kemudian peralatan seismograf ini tetap, kemudian, ada pemeliharaan operasional ini kami tambah, dan informasi untuk apa sekolah lapang iklim ini juga kami tambah sekolah lapang iklim kami tambah. Jadi, ada beberapa hal kami tambah termasuk sistem operasional informasi kualitas udara kami tambah, oh ya kami tambah anggarannya.

Kemudian, untuk ini masih *major project* masih berlanjut tadi, ada beberapa pengurangan dan penambahan. Mohon izin ini terutama alat pendeteksi geser *Wind Shear*, ini kami kurangi anggarannya. Kemudian, juga

ada ya ini layanan informasi kerentanan seismik di kota besar dari 10,532 ini menjadi sebetulnya masih sama hanya dipecah menjadi beberapa bagian.

Demikian, sehingga itu secara rincian prioritas nasional dan berikutnya komposisi jenis belanja Pagu Indikatif BMKG Tahun 2023. Di sini terlihat 39% adalah belanja barang, 36% belanja modal, dan 25% belanja pegawai dari total kurang lebih 3 Triliun.

Nah distribusi Pagu Indikatif BMKG Tahun 2023 di *slide* nomor 27 untuk program meteorologi klimatologi dan geofisika, ini baik untuk pusat dan daerah total 1,69 Miliar kurang lebihnya, ini terutama untuk pengelolaan-pengelolaan informasi. Kemudian program dukungan manajemen total 1,315 Miliar.

Kenapa? Oh mohon maaf ya mohon maaf triliun maksud saya. Ya ini karena Ribu Rupiah.

Jadi, saya ulangi mohon maaf.

Untuk program meteorologi klimatologi dan geofisika untuk pusat dan daerah total 1,694 Triliun dan untuk program dukungan manajemen total 1,315 Triliun, sehingga total keseluruhannya 3,010 Triliun.

Demikian Ibu dan Bapak,

Dan, sebagai penutup mohon izin kami sampaikan bahwa usulan RKA BMKG Tahun 2023 berdasarkan Renstra sebesar 3,398 Triliun. Namun berdasarkan surat bersama dari beberapa Menteri tentang Pagu Indikatif Belanja, kami mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar 3,010 Triliun.

Sehingga terdapat *backlog* sebesar 387,71 Miliar, *backlog* tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kerapatan jaringan aloptama dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi, juga mengakibatkan tidak terpenuhinya sarana pendukung operasional cuaca iklim dan gempa bumi serta belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam pemeliharaan peralatan operasional utama.

Selanjutnya, kami mohon dukungan Bapak yang terhormat, Bapak Ketua, Pimpinan, dan Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan, mohon arahan lanjut.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Ibu Prof. Dwikora yang sudah menyampaikan paparan Pagu Indikatif BMKG Tahun Anggaran 2023. Jadi, dokumennya diperbaiki Bu, Tahun 2023 ditambah dengan Tahun Anggaran 2023. Dan bagi rekan-rekan ini belanja modalnya besar sekali sehingga perlu kita pelototi pengawasan, terutama pada proses lelang jangan sampai usulan itu Pagunya terlalu yang menang terlalu jauh dari Pagu Anggaran dan yang itu-itu juga.

Kemudian, selanjutnya Bapak Marsekal Muda TNI, Marsekal Madya ya TNI Henri Alfiandi.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN.):

Terima kasih, Pak, waktunya, Pak.

**Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Komisi V,
Bapak-Bapak Ibu-Ibu para Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
serta
Hadirin yang berbahagia.**

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Nama Buddhaya,
Salam kebajikan.***

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kami bisa hadir di RDP Komisi V untuk menyampaikan paparan tentang Pagu Indikatif dan Perencanaan Tahun Anggaran 2023, kantor dari kantor Basarnas.

Sebelumnya masih dalam bulan puasa, izinkanlah kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Mohon Maaf Lahir Batin kepada semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua dan kami akan sampaikan hal-hal tentang RKA dan K/L dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023.

PESERTA RAPAT:

Ini bukan RKA dan KL, Pak, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, jadi bukan (suara kurang jelas).

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN.):

Ya, ya, oke ya. Kami akan koreksi, Bapak, siap.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan inklusif, ya, inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Basarnas menyusun rencana kerja mendukung RKP Tahun Anggaran 2023 terutama terkait Prioritas Nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan program prioritas berupa infrastruktur pelayanan dasar serta kegiatan prioritas keselamatan dan keamanan transportasi.

Basarnas menyelenggarakan kegiatan proyek prioritas nasional yaitu:

1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR.
2. Pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, keselamatan, keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan.

Dalam surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023, Basarnas ditargetkan memenuhi kegiatan prioritas nasional sebesar 857,26 Miliar. Target tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2022 sebesar 823,51 Miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan anggaran Basarnas Tahun 2023 yang mengalami penurunan dari 1,9 Triliun menjadi 1,7 Triliun.

Sehingga, Basarnas mengusulkan kegiatan prioritas nasional pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 748,8 Miliar. Kegiatan prioritas nasional tersebut berupa pengadaan peralatan SAR, penyediaan sarana SAR laut, sarana SAR darat, pengelolaan operasi SAR, pengelolaan sistem komunikasi SAR, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan sarana dan prasarana SAR, pemeliharaan peralatan sistem komunikasi, dan pemeliharaan peralatan teknologi informasi. Rincian usulan prioritas nasional Basarnas sesuai dengan surat Pagu Indikatif tersebut seperti Bapak Ibu bisa lihat pada *slide*.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati.

Basarnas mengusulkan Pagu kebutuhan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,62 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana sebesar Rp2,61 Triliun dan program dukungan manajemen sebesar 1,01 Triliun.

Pagu Indikatif Basarnas Tahun Anggaran 2023 adalah 1,75 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana adalah sebesar 892,02 Miliar, dan
- b. Program dukungan manajemen sebesar 860,20 Miliar.

Apabila Pagu Indikatif sebesar 1,7 Triliun tersebut dibandingkan dengan Pagu kebutuhan sebesar 3,62 Triliun akan terjadi *backlog* sebesar 1,87 Triliun yang terdiri dari program pencarian pertolongan kecelakaan dan bencana

sebesar 1,71 Triliun, antara lain digunakan untuk pemenuhan sarana SAR darat, laut, dan udara, sistem komunikasi, peralatan SAR, latihan SAR, dan pengembangan prasarana Balai Diklat.

Dan, program dukungan manajemen sebesar 154,45 Miliar, antara lain digunakan untuk pengembangan kelembagaan reformasi birokrasi, sarana dan prasarana perkantoran.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pada Tahun 2023 Basarnas melancarkan beberapa kegiatan, sebagaimana disajikan di *slide* antara lain, pengelolaan sarana dan prasarana SAR dengan anggaran sebesar 603,76 Miliar, pengelolaan pendidikan dan latihan pembinaan tenaga SAR dengan anggaran 63,91 Miliar, pengelolaan operasi SAR dengan anggaran 83,87 Miliar, pengelolaan sistem komunikasi SAR dengan anggaran 68,91 Miliar, pembinaan potensi SAR dengan anggaran 39,26 Miliar. Dan selanjutnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam *slide* yang tertampil.

Pada pembukaan Rapat Kerja Basarnas Tahun 2022, Presiden RI bersedia membuka dan memberikan arahan kepada Basarnas yaitu perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SAR, memperkuat sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak, dan memperkuat mitigasi bencana.

Di bidang inovasi, Basarnas telah menindaklanjuti dengan pemanfaatan teknologi sonar dan inovasi peralatan pencarian perikanan untuk digunakan mencari, mempercepat, menemukan korban yang berada yang korban tenggelam baik di laut maupun di sungai ataupun di danau. Dan, hasilnya bisa kami laporkan sangat signifikan, biasa korban tenggelam ditemukan di 3 hari, kita dalam 1 hari bahkan hitungan jam sudah bisa ditemukan. Hal ini adalah suatu peningkatan dari apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang SAR yang terbaik.

Di bidang peningkatan kompetensi sumber daya SAR, Basarnas akan melengkapi sarana dan prasarana Balai Diklat serta membentuk pusat pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan, dan membangun Balai Diklat baru di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perlu Bapak Ibu diketahui, kita telah mendapatkan tanah seluas 10 hektar di Sulawesi Selatan dan sudah bersertifikat dan siap dijadikan Balai Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Sulawesi Selatan.

Untuk meningkatkan sinergi kolaboritas, Basarnas melaksanakan menandatangani dokumen kerjasama dengan berbagai instansi, Pemda, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan untuk meningkatkan mitigasi bencana, Basarnas telah melaksanakan penyusunan rencana kontingensi, perhatian SAR, SAR *goes to school*, serta pelatihan potensi SAR di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut diperlukan dukungan penambahan anggaran, anggaran tersebut pada Pagu Indikatif sebesar 1,75 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Basarnas. Semoga juga *trend* adanya keadaan *emergency* atau bahaya juga berkurang, sehingga dana tersebut bisa mencukupi untuk tugas-tugas ke depan.

Untuk itu, Basarnas akan terus melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran dan mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah. Kami mohon kepada para Anggota terutama Bapak Ketua atau Wakil Ketua bisa mendorong Pemerintah memperhatikan tentang dukungan anggaran yang diberikan kepada Basarnas.

Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Beberapa permasalahan yang dihadapi Basarnas adalah belanja pegawai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 belum termasuk adanya usulan kenaikan tunjangan kinerja Basarnas menjadi 80%. Berdasarkan hasil penilaian reformasi birokrasi, Basarnas telah memenuhi kriteria untuk memenuhi tunjangan kinerja selama sebesar 80%. Sudah selama 10 tahun kami dinilai WTP namun acuan tunjangan kinerja masih seperti sama.

Dan, perlu saya sampaikan dalam rapat ini kita mendapatkan penghargaan atau peningkatan kemampuan Bapak Ketua yaitu dari *International Civil Aviation Organization regional Asia Pasifik* peringkat SAR Badan SAR Nasional naik menjadi peringkat ke-3 di seluruh Asia Pasifik. Dari peringkat 6 menjadi peringkat ke-3 di bawah, di atas, ya, di bawah Amerika Serikat dan Singapura. Ini suatu bukti bahwa kinerja dari sumber daya manusia atau personil Basarnas terbukti dan diakui sampai ke *regional*.

Yang kedua, Basarnas akan menambah 2 unit Eselon 2 yaitu Biro Hukum dan Kerjasama serta Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Ini adalah yang berada di Cariut selama ini, jadinya akan menjadi pusat nanti dan untuk Badiklat akan berada di Sulawesi Selatan. Namun demikian belum terdapat surat keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga belum dapat dialokasikan anggaran dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Basarnas akan mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah setelah ada keputusan resmi dari pemerintah terkait tunjangan kinerja dan penambahan unit Eselon II Basarnas.

Ketua, Pimpinan Ketua rapat, para Wakil Ketua.

Mohon maaf.

Bapak Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, kami akan rubah ini Bapak mohon koreksi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI kepada Basarnas selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Sekian.

Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selesai.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Saudara Kepala BMKG dan Saudara Kepala Basarnas BNPP.

Selanjutnya, kita akan memasuki tanya jawab atau respon dari para Anggota Komisi V, yang pertama kita persilakan kepada Saudara Bob Andika dari Fraksi PDI-Perjuangan.

F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta seluruh teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG, dan
Bapak Kepala Basarnas beserta seluruh jajarannya.**

Saya langsung saja.

Kepada BMKG, secara geologis dan klimatologis wilayah Indonesia ini termasuk daerah rawan bencana alam, Bu. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya dampak bencana alam bagi masyarakat. Memang masyarakat itu memerlukan informasi-informasi tentang bencana.

Saya lihat tadi, Ibu ada yang menjelaskan bahwasannya tadi mengenai sekolah lapang, bisa Ibu tambah, tidak dikurangi, tapi kita lihat tadi ada satu *item* bahwasannya Ibu kurangi, layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas. Ini Ibu kurangi ini, nah, ini kenapa BU? Ini saya ingin jelas dari Ibu ini kenapa bisa dikurangi ini, kenapa dari sekolah lapang bisa ditambah, ini dikurangi, kenapa nggak dari belanja barang Ibu aja dikurangi. Nah, ini tolong nanti penjelasan dari ibu.

Untuk Basarnas, kalau Basarnas ini saya payah komentar ini anggarannya terlalu banyak kali kena *backlog backlog* terus, tiap tahun begini terus begini terus, tapi Bapak disuruh kerja disuruh ekstra. Nah, Ibu Sadarestu sebentar lagi marah ini terus-terusan ini karena Bapak memang luar biasa kinerjanya tapi saya, Pak, perlu juga.

Saya yakin ini kan betul-betul ini anggarannya sekali ini memang betul-betul susunan Bapak ini Kepala Basarnas yang baru, kan. Saya lihat tadi banyak juga perubahan, karena Bapak saya lihat belanja-belanja barangnya yang *itemnya* yang penting-penting saya lihat, yang memang kebutuhan di Basarnas sekarang ini memang yang ini, karena kita lihat banyak yang kapal-kapal Bapak pun sudah cukup-cukup tua.

Sehingga anggaran yang kita lihat untuk pemeliharaan Bapak cukup besar. Nah, jadi tolong Pak ke depan dengan begini, belanja barang yang Bapak susun ini, target kita ke depan saya mohon supaya belanja-belanja pemeliharaan ini agak diturunkan Pak. Dengan efisien-efisien belanja barang Bapak seperti ini.

Saya ingin ke depan ya, kita lihat usulan-usulan Bapak anggaran ke depan supaya lebih efisien lagi terhadap belanja-belanja barang yang dibutuhkan oleh Basarnas. Karena kalau saya lihat walaupun kita cerita yang panjang-panjang, BMKG terus naik anggarannya, Basarnas selalu turun anggarannya.

Nah ini, jadi mungkin ini aja sedikit, Pimpinan. Kita nggak tahu nih sama-sama perlu ini bencana ini. Ibu BMKG kan kita perlukan juga untuk mendeteksi bencana tapi yang Basarnas lebih penting juga karena penanganan, langsung turun langsung untuk menangani bencana.

Mungkin ini sedikit dari saya, Pimpinan, saya ucapkan terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Bob.

Selanjutnya Bu Cen Soi Lan, Sui Lan ya, minta maaf, Bu, susah saya bacanya.

F-P.GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan ini salah nama terus.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Kepala Basarnas,
Ibu Kepala, Ibu Profesor BMKG, beserta jajarannya semua.**

Saya ke Ibu.

Ibu, tahun lalu kita membahas pinjaman luar negeri untuk MMS 2 ya, sampai saat ini kita belum dapat *update*-nya seperti apa, tolong dijelaskan, karena kita nggak tahu itu, belum ada sama sekali *update*. Kalau nggak salah itu juga menyangkut dengan radar yang di Kepri, jadi saya belum dapat *update*.

Yang saya lihat sekarang pinjaman luar negeri, Pagu, Ibu ini kan sekitar 460 Miliar, itu pinjaman dari luar negeri tetapi target yang Ibu diperlukan sekitar 389, bener kan? Nah, apakah itu sisanya pengembalian atau kalau pinjaman luar negeri itu kan biasanya langsung ada bunganya, benar nggak? Nah, saya tidak terlalu mengerti, tolong dijelaskan.

Juga mengenai data-data Ibu yang saya melihat agak aneh Ibu. Mengapa? Dari sumber dana Rupiah murni, layanan informasi gempa bumi 208 orang dengan Pagu 1,950 Miliar, kok bisa menang target Ibu menjadi 2.880 orang. Hanya dengan peningkatan menjadi 2,7 peningkatan 1 Miliar itu peningkatannya sampai 2.000 orang lebih dan banyak sekali Ibu, dari 228 dengan nilai 1.6 menjadi 2.000 orang dengan nilai 2,4. Jadi itu tidak masuk akal, jadi coba dijelaskan.

Masa peningkatan 100% orangnya ribuan, berapa persen pula. Dan itu banyak sekali, Ibu, sampai ke halaman 24. Ada yang 1 unit menjadi 610 unit, malah berkurang 1 unit itu pemeliharaan operasional jaringan 140 Miliar, kok Ibu jadikan 610 unit berkurang 139 Miliar. Jadi, hal-hal ini tolong mengapa berkurang pemeliharaan itu ataukah rusak atau seperti apa dari 2.000 pemeliharaan operasional aloptama MKG 2.317 unit berkurang 2.285, pemeliharanya berkurang itu karena barangnya rusak atau seperti apa.

Jadi, mohon data-data Ibu tolong dijelaskan karena kita melihat banyak sekali yang kita nggak mengerti. Dari 2 unit pembangunan alat pendeteksi geser angin 70 Miliar menjadi 2 unit cuma 18 Miliar. Apakah barangnya turun harga atau apa, jadi banyak sekali Ibu saya lihat di data-data Ibu, tolong dijelaskan Ibu.

Kepada Pak Basarnas, Pak Kepala Pak Henri, luar biasa saya melihat. Mengapa? Karena prioritas kita akan keselamatan nomor 1, dengan anggaran Bapak yang cuma 1.7 dibandingkan anggaran BMKG yang 3,9, Bapak sudah bisa berbuat sebegitu besar.

Yang saya khawatirkan dengan 1.7 ini kan Bapak sebenarnya sudah berkurang 50% dari Pagu yang Bapak minta dari 3 sekian itu dan itu sebenarnya memang tanggung jawab Komisi V untuk membantu supaya anggaran Bapak dinaikkan, kita setuju itu.

Bapak, saya mau tau apa trik-trik khusus kalau umpamanya dengan 1.7 ini bisa melingkupi semua, karena kita kan belum tau kenaikannya seperti apa. Dengan menurunnya sekitar 50% atau 100% ini luar biasa sekali, pasti Bapak

kan punya trik khusus, tolong diajarin. Mungkin juga nanti Kementerian lain akan belajar seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan, terima kasih, sekian dari saya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Bu.

Kemudian seterusnya Bapak Willem Wandik, ini tidak ada kemiskinan es krem Pak, silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

Pak Ketua.

Bapak Ibu Anggota Komisi V, dan juga Kepala BMKG dan Basarnas serta seluruh jajarannya yang kami hormati.

Pertama terkait dengan isu banjir rob daerah Pantura, terkait terjadinya banjir rob di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mengakibatkan masyarakat di 10 wilayah kena dampak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu disampaikan kondisi terkini oleh BMKG dan Basarnas sehingga kami di Anggota Komisi V ini bisa mendapatkan informasi secara akurat langsung dari sumbernya.

Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG bahwa akan adanya banjir rob di Jawa Tengah pada per 30 Mei sampai 7 Juni. Oleh karena itu, kami merasa perlu ada langkah-langkah yang perlu diambil sebagai kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik dari BMKG maupun juga Basarnas.

Dan, berikut terkait dengan RKA Kementerian lembaga dan RKP Tahun Anggaran 2023.

Pertama, tema RKP Tahun 2023 tentang Peningkatan Produktivitas Untuk Transportasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, di mana salah satu arah kebijakan terkait program utama pembangunan Ibukota Negara atau IKN Nusantara. Namun kami belum mendapatkan informasi dari bahan paparan yang disampaikan oleh BMKG maupun juga Basarnas terkait dukungan program kegiatan di IKN ini pada Tahun Anggaran 2023. Apakah memang belum waktu dari BMKG dan juga Basarnas memberikan kontribusi atau mungkin perlu ada penjelasan lain.

Dan kedua, kami melihat program dan kegiatan dari BMKG dan juga Basarnas pada Tahun Anggaran 2023 ini banyak program regular. Oleh karena itu, kami harap dalam proses perencanaan sampai pada implementasinya bisa berjalan sebagaimana harapan kita.

Dan yang ketiga, Tahun 2023 dan kami memasuki Tahun 2023 dan 2024 nanti akan masuk ke tahun politik. Oleh karena itu, perlu dukungan dari BMKG dan Basarnas perlu dipikirkan sedini mungkin, terutama ini karena kita dihadapkan pada tradisi baru, ini yang mungkin kedua terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yaitu membutuhkan energi yang besar dan sumber daya yang besar yang perlu disiapkan sejak dini. Karena kita punya pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu beberapa tahun lalu, pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak itu kami menghadapi tantangan yang luar biasa.

Seperti halnya kami di beberapa wilayah seperti katakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan juga Ambon, itu di sana banyak kawasan-kawasan ekstrim baik dari laut, di udara, juga di darat. Sehingga banyak terjadi insiden di sana, bahkan Bapak coba nanti buka di data bisa lihat di situ banyak penyelenggara yang jadi korban di sana.

Ada yang tenggelam di laut, ada yang hanyut di sungai karena dihadapkan pada situasi yang memang agak ekstrim dan di sini memang kita membutuhkan sumber daya yang besar dalam menghadapi tahun politik itu. Oleh karena itu, kami mengharapkan perhatian dan dukungan dari BMKG dan Basarnas supaya dari sekarang mulai dipikirkan dan ini saya harap perlu dapat dukungan dari Ketua dan juga Anggota Komisi V.

Dan, berikut dengan kondisi terkait dengan penyelenggaraan sekolah, ya, lapangan, sekolah lapang, lapang iklim, terus nelayan, dan juga gempa bumi. Kami harap perlu juga perhatian untuk kami di wilayah Timur perlu diselenggarakan kalau memang dimungkinkan.

Ya, itu yang mungkin bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sekian terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Willem.

Selanjutnya, Ibu Sadarestuwati, Sadar.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V, dan juga
Yang saya hormati Ibu KBMKG beserta jajaran, dan juga
Bapak Kabasarnas beserta jajaran.**

Yang pertama untuk BMKG, Bu, saya biar nggak berlama-lama langsung saja. Saya ingin membuka di halaman 18 terkait dengan sasaran program dan target kinerja.

Di sini saya sedikit *surprise* karena di sini sasaran program untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di antaranya meningkatnya layanan informasi meteorologi yang berkualitas, targetnya 91% untuk akurasi informasinya. Kemudian, untuk akurasi informasi klimatologi hanya 83%, akurasi informasi geofisika 91%, ini target.

Yang ingin saya tanyakan, selama ini berapa, berapa akurasi dari ketiganya ini. Sehingga, Ibu membuat target yang menurut saya terutama untuk klimatologi ini juga sangat kecil. Kalau target apalagi seperti meteorologi geofisika ini, juga harusnya ya target setinggi-tingginya karena ini berkepentingan untuk apa yang selalu saya katakan keselamatan.

Seperti kemarin pada saat mungkin sekitar dua minggu yang lalu ketika saya menelepon Ibu berkaitan dengan cuaca ekstrem. Yang saya diperintahkan untuk segera menindaklanjuti dari informasi-informasi itu oleh Ibu Ketua Umum yang ternyata terjadi. Artinya apa, artinya yang seperti ini data-data yang akurat lah yang sangat diperlukan. Jangan sampai beberapa waktu yang lalu sering terjadi apa, mohon maaf, sedikit *slek* data yang juga kemudian mengakibatkan kegaduhan.

Maka dari itu, menurut saya kurang tepat kalau target untuk akurasi dari informasi ini seperti yang ditunjukkan di halaman 18. Nanti saya mohon ada penjelasan dan tentunya dengan harapan ada peningkatan dari target yang sudah ada target yang ditayangkan ini, dituangkan ini. Karena peralatan-peralatan yang dimiliki BMKG ini peralatan yang sudah canggih semua dan tiap tahun pengadaan juga luar biasa. Yang artinya, harusnya ada keseimbangan antara anggaran yang semakin meningkat dengan capaian dari atau hasil dari apa kinerja, kinerja berarti secara keseluruhan itu juga harus lebih baik.

Kemudian, di sini juga di halaman 20. Di halaman 20 di dukungan manajemen, dukungan manajemen Pagu kebutuhannya 1,238517805, ini kebutuhan Renstranya. Ada *backlog* 77,283 ini artinya ada kelebihan karena indikatifnya 1,315800855. Saya nanti mohon dijelaskan peruntukannya ya, Bu ya.

Kemudian juga, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Cen, berkaitan dengan pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi, kemudian SLI ya, yang semuanya sekolah lapang ini dari usulan BMKG ditargetkan sampai ribuan orang 2.880 orang, 2.620, 1.580, dengan anggaran yang bedanya tidak banyak dengan 2.880 orang, anggarannya usulan BMKG 2,730 Miliar.

Kemudian dari SBPI, SBPI itu apa sih, Bu.

Oh dari Pagu Indikatifnya, Pagu Indikatifnya 1.950, targetnya hanya 208 orang, ini kan jauh sekali, ya. Berarti kalau gitu hitungannya per kalau cuman 100, 1950 dibagi 250 orang saja 7.800.000 per orang. Nah, coba kami nanti di

selisihnya jauh sekali, coba nanti kami dijelaskan di terangkan lebih detail hitung-hitungannya seperti apa, ya.

Kemudian juga ini masalah apa *awos*, ya kalau di bandara itu untuk keamanan kalau mau mendarat *take off* ya. Saya kira justru itu harus diperhatikan betul melihat saat ini cuaca yang memang tidak menentu ya dan selalu ekstrim rata-rata. Ini perlu sekali untuk kemanan apa penerbangan, sehingga saya kira hampir semua bandara ini harus ada. Saya tidak tahu gimana caranya tolong ini dipikirkan.

Seperti kemarin ada Garuda yang juga mau mendarat, kemudian ada puting beliung. Seperti ini, ini contoh-contohnya saja. Sehingga perlu ada apa namanya perhatian ekstra karena anggaran BMKG ini menurut saya juga sudah sangat besar ya dan juga tentunya, Ibu, saya berharap sekali BMKG bisa memberikan yang lebih baik daripada yang saat ini karena saya tahu walaupun dari BPK diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

Akan tetapi banyak sekali catatan-catatan yang seharusnya itu yang namanya semakin tahun semakin diberikan WTP harus catatannya semakin sedikit, karena kalau catatannya besar kalau saya yang menilai saya katakan itu bukan lagi WTP. Tapi ini sebagai pemacu untuk teman-teman di BMKG lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Untuk Basarnas. Basarnas, saya tentunya memberikan apresiasi dan selamat atas prestasi yang sudah ditorehkan apalagi prestasi di, apa, internasional dengan anggaran yang semakin kecil. *Nelongso* saya kalau melihat anggaran Basarnas ini. Ini saya nggak tahu orang-orang Basarnas ini mau diapakan ya, *mesakno*, Pak, *melas*.

Mungkin dari teman-teman saya berulang kali selalu saya katakan di mana-mana, tolong yang di Banggar ini bisa diperjuangkan. Seandainya saya yang ditaruh di Banggar, saya akan mati-matian berjuang untuk ini. Sayangnya saya tidak di Badan Anggaran, Pak.

Sehingga dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh Basarnas dengan anggaran yang ada, ini timpang, Pak Ketua. Di mana-mana ada, banjir ada Basarnas, kecelakaan udara Basarnas, bahkan kemudian ada orang hilang Basarnas, *minimarket* roboh Basarnas. Tapi, anggaran semakin habis, ini kan nggak adil.

Mohon maaf bukan saya apa-apa, jangan kemudian dibilang ini dekat dengan Basarnas, dulu saya dekat dengan BMKG loh, sampai sekarang saya dekat karena memang mitra sudah 13 tahun. Bukan ada apa-apa, tetapi saya memang dua lembaga ini saya memang sangat konsen. Untuk apa, karena kedua-duanya ini sangat penting, sangat penting dan juga menjadi salah satu wajah, wajah negara, wajah Indonesia. Makanya saya selalu, ya, ya seperti ini lah, jadi bukan berarti saya bersuara seperti ini saya marah, tidak. Saya itu baik hati dan tidak sombong.

Ya, tapi kedua, saya sampaikan apa, ya, ini ada sebuah perbaikan yang luar biasa. Memang beda koki, beda cara memasaknya, sehingga barang-barang yang dipilih pun pasti berbeda. Sehingga, saya katakan luar biasa dengan tanpa banyak apa barang-barang *opo nek ngarani Mbak neng wong jowo*, printilan-printilan yang di, di, apa, diadakan tetapi yang diadakan benar katanya Mas Bob tadi, ini barang-barang yang sangat dibutuhkan.

Tetapi di sini saya belum melihat untuk apa untuk pengadaan kapal yang memang saya kapan hari, sempat menggunakan kapal itu, ini kalau ini ditempuh berapa lama ya saya bilang, ini kapal baru jalan sudah terombang-ambing, gimana kalau di tengah lautan, di lautan bebas gimana gitu, ini nyawa taruhannya.

Artinya apa, Pak Ketua, bahwa secara umum Basarnas ini membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Belum lagi untuk diklat, Pak, mohon maaf diklatnya SAR ini *nelongso* nggak ada apa-apanya, kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di Kementerian. Ini untuk mencetak tenaga-tenaga profesional dalam pencarian dan keselamatan, tetapi kondisinya alakadarnya. Bagaimana mau bisa mencetak tenaga profesional, fasilitasnya, sarana-prasarana nya saja nggak ada. Bahkan dibikin dari apa itu truk kontainer disulap saking kreatifnya ini orang Basarnas.

Saya tidak akan menyoroti banyak hal nanti di pembahasan berikutnya tentunya saya akan lebih detail, tetapi sekali lagi selamat dan mohon anggaran yang kecil ini benar-benar diperuntukan hal-hal yang penting, terima kasih, saya akhiri.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Bu Sadar. Kalau saya tidak melihat Ibunya, Pak, saya seperti mendengar suara Ketua Umum PDI-Perjuangan, gaya-gayanya sama, kalau rapat koalisi, ya, begitu biasanya.

Selanjutnya, Pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak Ketua yang saya hormati saya cintai saya banggakan,
Ibu Ketua BMKG beserta jajaran dan rombongannya,
Bapak Ketua Basarnas beserta jajarannya dan rombongannya,
Rekan-rekan Anggota Komisi V.**

Walaupun sedikit tapi pertanyaan-pertanyaan awalnya pada tajam-tajam, jadi tidak mengurangi kualitas peserta, Pak Pimpinan.

Saya tidak akan bertanya, saya akan menyampaikan pujian dan harapan. Sebelumnya saya mulai ada pepatah.

*Lain padang lain masakan
Lain Anggota lain pertanyaan
Lain gadis tapi bisa pacarnya sama
Jadi tidak lain*

Kalau pujian saya kepada Ibu Ketua BMKG, masalah SLI. SLI itu dulu periode-periode pertama itu ya digenjot untuk padi saja, tapi pada periode yang terakhir ini berkembang dengan pesat SLI untuk tomat, untuk bawang putih, untuk cabe, dan terakhir tembakau. Sehingga Dapil saya di Temanggung yang hampir 60% itu petani Temanggung, tembakau, sekarang sudah terbuka dengan bantuan SLI dia semangat untuk mengisi setelah panen tembakau, jadi itu saja.

Tolong tadi SLI yang sudah dengan lompatan-lompatan ini saya terpikir ini karena terpengaruh Sea Games nya lari itu sukses.

Kemudian harapan Pak dari Basarnas, Bapak jangan kaget ya, karena Bapak baru, sestamanya mungkin juga baru. Jadi, pelatihan di Pemdes itu 200 per hari, makan komplit 3 kali, pakaian komplit, BMKG 150 peralatan komplit, makan komplit, bahkan kalau ada pelatihan yang khusus itu sampai 3 bulan, lalu Kementerian PUPR untuk pelatihan tukang 100.

Saya tidak mengerti Basarnas itu untuk honor peserta kok hanya 50. Nah, kalau memang anggarannya, Pak Sestama, saya ini khususnya Pak Sestama ini bukan urusannya, Ketua, ini urusannya Sestama, kalau memang anggarannya mepet jumlahnya di pepet, Pak, karena kalau dibanding dengan Basarnas, Basarnas yang dulu jauh sekali. Dulu itu upacaranya seperti militer semuanya apa lengkap, sepatunya itu kayak lari itu kalau siap grah. Itu jadi ada rasa kebanggaan, sekarang nggak, Bapak hanya kasih seragam hanya ini.

Tolong ini bukan kesalahan ini, karena saya agak apa ya, agak nggak begitu enak, lalu entah itu Direktur panjenengan karena semua peserta merasa bangga ini ini, iya, Pak, tapi kalau 50 bukan bangga. Kalau 50 bukan bangga malahan pemilih-pemilih saya pada lari, *wong* kita aja yang nggak pakai uang negara aja kalau rapat kasih Rp100.000, kok.

Jadi ini aja pesan saya, Pak, taro lah Bapak punya 39 Miliar. Tolong ini dibagi rata, misalnya Anggota 56, anggaplah satu pelatihan itu 500. Jadi ada 28 M, sisanya 11 M untuk operasional. Jadi, pelatihan jangan ke mana-mana bagi aja dulu, Pak, ini karena seperti teman-teman yang lain, tahun depan itu tahun tantangan *the years of challenge* supaya bisa terpilih lagi.

Sekian, Bapak Pimpinan matur nuwun. Jadi nggak usah dijawab gak usah ditanggapi ini hanya pujian dan harapan, terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Sudjadi, itu bagus Pak, ikan apa,

Ikan kakap ikan mujair, Banyak cakap tapi tidak cair-cair.

Jadi beliau mengeluhkan soal honor peserta, Pak, ya, itu supaya jangan lama-lama rapatnya jadi bisa ditingkatkan lah, Pak 50, 50.000 itu. MPR aja kan 150.000 ya per orang untuk sosialisasi 4 pilar.

Masih, selanjutnya, Ibu Sri Rahayu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Ibu Kepala BMKG, Bu Dwikorita dan seluruh jajarannya, Pak Kabasarnas, Pak Henri dan seluruh jajaran, serta Hadirin semuanya.

Tadi sudah banyak dikupas oleh teman-teman, Bu Cen dan Bu Restu. Yang ingin saya pertanyakan, kalau tadi dipertanyakan ini kok bisa kenaikannya segini dan seterusnya karena mungkin perlu diteliti juga oleh BMKG dulu ini.

Yang ingin saya pertanyakan, apakah standarnya beda antara SBPI tadi ya, apa namanya, kesepakatan bersama ya itu ya, dengan usulan BMKG. Lalu siapa yang usulkan yang kesepakatan bersama ini, yang SPBI ini siapa yang usulkan gitu. Sehingga satuannya berbeda jauh, karena banyak Bu ini semuanya nggak perlu saya sebutkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Restu dan pertanyaan Bu Cen.

Saya langsung saja yang kedua, kemarin artinya sekolah lapang memang dibutuhkan dan terutama di sekolah lapang yang pantai itu, gempa, itu menurut saya sangat penting sekali. Dan ini, Bu, saya mohon dengan hormat bahwa kepedulian dari Pemerintah Daerah, BPBD ya kalau di sana kerjasamanya. Itu menurut saya kurang, sehingga perlu dikoordinasikan antara daerah, kemudian Basarnas juga yang ada di daerah.

Dan, dari BMKG, bagaimana membentuk orang-orang yang sudah diberikan sekolah ini untuk menjadi *community*, ya, menjadi komunitas yang tentu juga bisa bekerjasama dengan lingkungan, baik itu ada di pantai-pantai itu ada lingkungan mungkin yang mananam pohon, mungkin lingkungan apapun komunitas apapun yang ada di situ untuk dibentuk sehingga gerakan-gerakan itu bisa dilakukan dengan komando yang lebih apa ya, lebih terstruktur, karena kalau misalnya sekolah lapangan sudah selesai kemudian

dibiarkan begitu saja, mereka tidak bisa jalan sendiri-sendiri meskipun ada informasi tentang apa informasi-informasi cuaca yang melalui, melalui *website*-nya melalui WA dan seterusnya itu ada.

Tetapi, untuk gerakan-gerakan menurut saya perlu ada *community* ada komunitas yang memang bersama-sama dan sekali lagi Pemerintah Daerah ini perlu dikuati, Bu, perlu diajak bersama untuk itu supaya mereka bisa jalan tidak hanya gantung ke pusat saja. Jadi seakan-akan tugas pusat, padahal itu kan wilayahnya wilayah Kabupaten/Kota setempat, gitu ya, sehingga menurut saya perlu.

Dan, yang ingin saya usulkan dulu sudah pernah saya sampaikan, mungkin tidak hanya di, yang saya kunjungi atau kemarin tempat pelatihan tetapi mungkin di seluruh Indonesia tolong Toanya diganti Toa, apa ya pengeras suaranya ya karena itu sangat kecil. Kalau itu pantainya panjang dan mungkin jaraknya agak jauh dengan perumahan-perumahan orang yang ada di pantai maka itu tidak akan kedengaran.

Kemarin, Pak Suko saya suruh lihat Bu ke pantainya, tolong Pak dilihat itu jangan sampai dikira saya nanti *ngapusi*, begitu, saya lihat, saya suruh lihat untuk supaya nanti digantikan untuk yang lebih kuat lagi yang lebih besar lagi. Saya kira itu untuk Bu Dwikorita, sekolah lapang masih tetap perlu, Ibu, baik itu untuk gempa, untuk mungkin iklim atau cuaca, dan seterusnya.

Yang kedua, Pak Kabasarnas. Saya tadi kalau yang lain-lain tadi merasa sedih saya juga *hopeless* juga Pak, diklatnya ini nggak ada anggarannya ternyata, tempat Badiklat yang kami juga sangat berharap bahwa di Tahun 2023 ini muncul tapi ternyata di sini juga tidak muncul. Kemarin janjinya kan ya kemaren janjinya Tahun 2023 mengingat tadi sudah diuraikan Bu Restu itu untuk kepentingan Basarnas, baik itu secara domestik nasional maupun untuk internasional karena tadi juga selamat, sekali lagi selamat sudah mendapatkan predikat apalagi Asia Pasifik yang nomor 3 itu, *ndak* main-main.

Artinya ya jangan kemudian kita juga, Pak Tamliha, Pak Pimpinan ini kan juga kebetulan Banggar juga ya. Tolong, Pak, betul-betul diperjuangkan untuk diklatnya Pak, angkanya 300 sekian Juta ya, Pak, ya kalau nggak salah. Oh Miliar *sorry*, Miliar Pak. Itu untuk tempat pelatihan ya di air, Pak, sementara ini masih *nyewo*, masih *nyewo* punyanya angkatan laut dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan Basarnas.

Jadi, kalau sekarang tidak ada lagi mau tahun berapa ini, ini periode Pak Jokowi sudah abis nanti lama-lama nggak, nggak bisa, nggak bisa apa, iya. Ini bukan soal periode-periode juga tetapi juga ini kepentingan dari Basarnas itu sendiri karena memang perlu, ya maksudnya Basarnas kan untuk Indonesia bahkan untuk internasional juga, apalagi sudah dikenal di dunia begitu.

Saya mohon dengan hormat, Pak Tamliha, diperhatikan di Badan Anggaran, tidak banyak, Pak, 300 sekian itu kalau dibandingkan dengan angka-angka anggaran PUPR itu jauh sekali.

Kemudian yang kedua, Pak, saya ingin memberikan saran. Tadi sudah disampaikan bahwa Basarnas memilih hal-hal yang urgen, tetapi saya ingin ngotak-atik begitu.

Usulan Pagu Indikatif alokasi itu yang, yang bersama, kan, sudah ditentukan itu ya Pak ya. Misalkan ambil contoh misalnya, yang nomor 2 sarana SAR *Rigid Buoyancy Boat*, kelas 1, 30 Miliar jumlahnya 6, itu tidak dimasukkan di dalam tahun, Target Tahun 2023 nggak ada *nggeh*, nggak dianggarkan.

Nah, apakah tidak memungkinkan, misalnya sarana SARS *Rafting Boat* ini ada 20 yang diusulkan di Pagu Indikatif, SB, Pagu Indikatif. Kemudian Bapak mengusulkan 30 dengan, memang dengan angka yang lebih rendah. Nah ini kadang-kadang juga, juga apa ya bingung kita ini, 20 harganya 8 M, tapi 30 harganya 6 M, gitu, ini hitung-hitungannya seperti apa. Ya, ya, makanya saya saya nanti di berikan penjelasannya.

Misalnya lagi sarana SAR, *Rescue Truck*, tipe yang II, itu 6, apakah ndak bisa dibelikan 3 dulu misalnya. Yang lainnya mana? Yang lainnya diarahkan ke mana? Misalnya diarahkan ke yang nomor 3 sarana SAR *Rigid Boat, Buoyancy Boat* kelas 2 tadi, bisa membeli 2 misalnya. Apakah tidak bisa demikian gitu, sehingga termasuk yang nomor 2, sarana SAR *Boat* yang kelas 1 itu juga bisa dibeli misalnya yang itu anggarannya 6 bisa dibeli 3 dulu, kenapa tidak demikian gitu. Sehingga, yang lain-lain bisa terpenuhi dan termasuk apa yang dianggap Bapak tadi *priority* itu juga bisa terpenuhi begitu.

Kan, tidak, tidak terlalu besar, sebenarnya yang hanya di yang hanya dibagi itu yang nomor 9, kemudian nomor 4 yang halaman 4 ya, kemudian dialihkan ke nomor 2 dan nomor 3. Halaman 4, Pak, itu maksud diotak-atik supaya semuanya yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi meskipun nanti mungkin tahun 2024 bisa terpenuhi kembali apa yang menjadi harapan dan keinginan dari Basarnas itu sendiri.

Saya itu saja, terima kasih sekali lagi selamat mudah-mudahan predikat yang telah digapai pada tahun ini bisa semakin meningkatkan kinerja Bapak walaupun harus harus agak sedikit puasa, prihatin, tapi saya yakin *super power* Bapak semuanya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Bu Sri Rahayu.

Kemudian, Pak Sudewo.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan semua kawan-kawan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Kepala Basarnas beserta jajarannya,
Kepala BMKG beserta jajarannya, yang saya hormati.**

Saya hanya ingin menyampaikan pendalaman yang sifatnya makro saja. Tolong Kepala Basarnas memberikan satu pemahaman kepada saya kepada kami, apa sesungguhnya yang menjadikan dasar pemikiran atau kerangka berpikir Kepala Basarnas ya, sampai harus menyusun program-program ini belanja barang dan belanja modal yang sedemikian rupa ya.

Kira-kira apa yang mendasari ini semua? Apakah ini didasarkan pada satu kejadian di Tahun 2021 atau kejadian di Tahun 2022 yang semuanya ini memberikan satu gambaran untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di Tahun Anggaran di Tahun 2023. Apakah belanja yang direncanakan di Tahun 2023 ini memang merupakan sesuatu yang pas atau presisi atautkah mendekati presisi begitu. Jangan sampai apa yang dirancang untuk dibelanjakan di Tahun 2023 ternyata sesuatu yang tidak efektif, mengingat apa yang akan terjadi di Tahun 2023 nanti ternyata jauh dari apa yang terjadi apa yang dibayangkan.

Nah, ini kalau misalnya dari Basarnas menyampaikan kepada kami bahwa satu kejadian menonjol baik secara nasional maupun regional di Tahun 2021, Tahun 2023. Apakah itu kecelakaan transportasi laut, apakah kecelakaan transportasi darat, apakah kecelakaan faktor bencana alam, banjir tanah longsor, atau apa, begitu yang kemudian memberikan satu gambaran bahwa Basarnas memprediksikan apa yang akan terjadi di Tahun 2023 adalah A, B, C, D.

Sehingga apa yang akan dibelanjakan di Tahun 2023 itu *Insyah Allah* tepat, mengapa saya katakan *Insyah Allah*, karena memang masih masih sesuatu yang mungkin, gitu, tidak bisa presisi gitu. Berbeda halnya dengan Kementerian PUPR misalnya, apa yang akan dibelanjakan itu semuanya 100% sesuai dengan yang direncanakan, meskipun anggarannya 100 Triliun lebih bisa dibilang apa yang direncanakan adalah presisi dengan pelaksanaannya. Tapi, kalau Basarnas memang tidak bisa menjamin 100%, semuanya bisa atau hampir kebanyakan bukan semuanya, kebanyakan itu adalah asumsi.

Saya sih tidak meragukan kinerja Basarnas, mengingat tahun-tahun sebelumnya faktanya, Basarnas, ya, juga mampu mengatasi segala hal dengan kerja cepat, kerja tepat, sesuai dengan harapan masyarakat itu. Tetapi apa yang akan dilakukan tahun depan itu kan mestinya juga direncanakan berdasarkan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Jadi, kalau Basarnas menyampaikan kepada kami potensi terjadinya bencana, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas laut, udara, maupun darat kereta api, itu demikian-demikian kepada kami. Sehingga kami itu juga punya gambaran apa *item-item* yang akan dibelanjakan oleh Basarnas itu ini memenuhi unsur objektivitas gitu, ya, paling tidak seperti itu.

Ada logika yang kita bangun bahwa apa yang akan dilakukan Basarnas itu memang masuk akal. Jadi tidak langsung rencana kerja belanja a, b, c, d membelanjai helikopter, belanja kapal, belanja macam-macam itu, ya, tapi kami tidak punya gambaran sama sekali. Sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Basarnas dengan belanja *item-item* tersebut.

Kemudian, BMKG juga demikian, BMKG agak detail, punya kebijakan di bidang geofisika, arah kebijakan di bidang meteorologi, tapi arah kebijakan tersebut juga tidak dilengkapi dengan dasar pemikiran, ya, apa yang terjadi di tahun sekarang atau tahun sebelumnya dan juga tidak didasarkan pada apa mitigasi untuk yang akan datang, gitu kan. Tahu-tahu dengan arah kebijakan tersebut langsung belanja demikian-demikian.

Kalau soal belanja *item per item* sesuatu yang gampang. Kalau ada duitnya itu bisa dibelanjakan, kalau tidak ada duitnya lah itu sesuatu yang masalah. Tetapi kalau ada duitnya mau belanja apa saja ya gampang, cuman ya strategi. Strateginya dengan uang yang sedikit ini kemudian tanggung jawab dan beban yang sangat luar biasa, maka diperlukan satu perhitungan yang cermat jangan sampai *item-item* yang akan dibelanjakan itu ternyata tidak efektif, ternyata *mubadzir*, ternyata sia-sia atau percuma. Uang sudah terbatas hanya sedikit, dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak produktif juga, tidak tepat tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya.

Maka saya juga ingin mendapatkan gambaran dari BMKG, mitigasinya seperti apa Tahun 2023, harus belanja *item-item* semacam ini. Di bidang meteorologi ini, geofisika ini, itu apa mitigasinya ke depan gitu, kira-kira apa gitu kan. Jadi kami itu jangan hanya diajak berpikir harus belanja A belanja B belanja C. Kami ini Anggota-Anggota Dewan gitu kan, Anggota Dewan itu selalu berpikir bagaimana uang ini bisa dipertanggungjawabkan.

Itulah namanya politik anggaran. Bukan anggaran kita bawa untuk kepentingan politik tertentu atau untuk kalau untuk kepentingan golongan tertentu. Tapi politik anggaran itu adalah anggaran yang tersedia dalam jumlah tertentu tetapi efektif penggunaannya untuk kepentingan masyarakat, itulah politik anggaran, ini yang kita diskusikan. Nah, untuk mendapatkan suatu gambaran bahwa anggaran itu betul untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang banyak, apa yang dibelanjakan itu tidak sia-sia tidak percuma, itulah yang perlu kami mendapatkan gambaran dari Pemerintah gitu.

Jadi jangan langsung belanja A belanja B belanja C, kalau soal nominal hitungan angka, ya, jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR. Tapi jumlah sedikit itu belum tentu kurang gitu kan, jumlah sedikit itu bisa menjadi turah atau berlebih tergantung kebutuhan. Memprediksikan sebuah kebutuhan itu harus dengan satu kecermatan, inilah yang kita butuhkan dari Pemerintah untuk mendapatkan itu.

Kembali lagi kepada Basarnas, Basarnas ini kan jangkauannya nasional, bahkan internasional, internasional ya, Pak. Sudah pernah melakukan kegiatan di luar negeri, sering. Nah, ini yang saya juga apresiasi kepada Basarnas gitu

dengan strateginya yang canggih anggaran demikian tidak hanya melakukan kegiatan secara nasional tetapi juga internasional.

Kembali lagi kepada Basarnas, begitu banyaknya bencana, ya, baik itu skala nasional maupun lokal itu membutuhkan kehadiran Basarnas. Masyarakat itu tidak paham mana garis embargasinya Basarnas itu nggak paham, pokoknya ada bencana Basarnas lah harus hadir. Padahal di situ harusnya Pemerintah Daerah yang utama hadir, tapi masyarakat sudah melekat *mindset*-nya itu adalah tupoksinya Basarnas.

Inilah yang diharapkan Basarnas tidak hanya melakukan sesuatu karena tupoksi tapi juga karena peran, karena *alhamdulillah* Kepala Basarnas juga melakukan lebih daripada itu yaitu perannya, di mana-mana bisa menjangkau. Untuk lebih efektif supaya Basarnas hadir di setiap bencana itu terjadi, pentingnya Basarnas menciptakan relawan-relawan Basarnas relawan-relawan Basarnas.

Di daerah-daerah di mana dibentuk relawan Basarnas, masyarakat itu bangga menjadi relawan Basarnas. Ini modal dasar Basarnas untuk mengeksploitasi semangat masyarakat untuk membantu para bencana, ini modal dasar. Tanpa ada modal dasar semangat dari masyarakat rasanya sulit Basarnas membentuk relawan-relawan itu.

Tapi modal dasar itu sudah didapat, masyarakat bilamana diberi pelatihan oleh Basarnas, diberi seragam Basarnas, itu kebanggaannya luar biasa. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, tanpa diberi komando dengan seragam itu dia langsung turun tangan, dengan modal yang pas-pasan dia langsung turun tangan memberikan bantuan secara cepat. Bahkan Kepala Basarnas belum menginstruksikan sudah ada orang relawan berada di lokasi bencana tersebut.

Menciptakan relawan-relawan di daerah itu menjadi sesuatu yang penting strategi yang tepat. Saya ulangi, menciptakan relawan-relawan di daerah itu adalah strategi yang tepat dilakukan oleh Basarnas dengan modal yang sedikit. Ini ada korelasinya dengan apa yang diusulkan oleh Pak Sudjadi, ini ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudjadi bahwa tahun depan adalah tahun politik, ya. Menciptakan relawan Basarnas tidak hanya semata-mata karena Anggota Dewan punya tujuan politik, tidak, tetapi ini strategi yang tepat dilakukan oleh Basarnas.

Coba dibayangkan bilamana membentuk Basarnas dalam jumlah 500 orang misalnya dalam satu Kabupaten yang punya kerawanan tinggi yang, punya kerawanan tinggi terhadap bencana itu hanya bermodalkan 500 Juta, itu tidak banyak. Jika dibandingkan belanja alat yang sedemikian rupa yang belum tentu itu tepat, ya. Saya bukan berarti mengatakan tidak tepat, yang belum tentu tepat, tapi dengan menciptakan relawan saya anggap lebih tepat karena langsung cepat bekerja.

Maka saya juga mendorong Basarnas, bentuklah relawan Basarnas itu sebanyak mungkin, disesuaikan dengan peta potensi terjadinya bencana itu,

ya. Jadi kalau misalnya, Pak Djadi tadi menggambarkan satu Anggota ini 500 Juta, coba tolong di *breakdown*, Anggota ini kemudian suruh menentukan daerah yang rawan ikut juga bekerja memetakan potensi yang rawan di antara Kabupaten di daerah pemilihan, nah ini membantu Basarnas.

Kemudian di situ diciptakan relawan hanya satu kali bekerja Basarnas, menciptakan relawan itu hanya satu kali bekerja, yaitu satu kali menganggarkan, satu kali pelatihan, setelah itu dilepas dia langsung bekerja, ini efektif dan efisien, gitu. Maka saya juga mendorong Basarnas bentuklah relawan sebanyak-banyaknya tapi juga kami sebagai Anggota Komisi V ini mitra kerja Basarnas, Basarnas juga harus tau bagaimana posisi kami, bukan berarti untuk kepentingan pribadi tetapi ini ada satu kesetaraan sebagai mitra.

Jadi saya ingin kembali lagi kepada Basarnas dan BMKG, saya jangan hanya diberi sodoran belanja *item per item*, ini, kami bukan eksekutif begitu ya, kami bukan Pemerintah yang tidak, tidak mungkin kami akan melihat satu persatu per *item* ini gunanya untuk apa, belanjanya caranya bagaimana, kemudian nanti dipakai atau tidak, itu bukan urusan kami. Kami itu kasih dasar pemikiran kenapa sampai belanja dengan model yang semacam ini dengan anggaran yang sekian.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Sudewo.

Jadi, Bu Kepala BMKG

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kayak Pak Sri Rahayu tadi, Ibu Sri Rahayu tadi bilang yang saya suara Toa itu kecil gitu, itu kayak iklan mobil Isuzu saking halusnyanya suaranya nyaris tidak terdengar. Jadi harus keras-keras, Bu, peringatan tsunami, gempa, dan sebagainya.

Silakan, Pak Tamanuri, ini ke mana aja Pak Tamanuri.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Saya ada tiga tempat Pak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Barengan tiga orang jalan ke sini.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Banggar juga.

Makasih, Pak Ketua.

**Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang terhormat Pak Kepala Basarnas beserta jajaran, dan
Ibu Kepala BMKG beserta jajarannya.**

Saya tidak banyak ini, karena saya tidak ikuti tadi, akan tetapi saya terpenggil oleh Bapak dan Ibu saya harus hadir saya lihat itu aja. Jadi ini sedikit aja Pak Kepala Basarnas, saya waktu kami kunjungan kerja ke Lampung naik kapal 60 Ton dari kapal Basarnas. Kapal itu kita beli tentu mahal, Pak, tapi sayang pemeliharannya kurang, AC nggak hidup, tempat buang air karatan. Nah, ini ini tolong di perhatikan Pak itu, begitu, soalnya itu bukan harganya 10 Juta 20 Juta tapi mungkin apa Miliaran.

Oleh karena itu, mohon perhatiannya, mungkin juga di tempat-tempat lain bukan hanya di antara Lampung dengan Bakauheni dengan Merak tapi mungkin juga tempat lain, seperti itu. Jadi, harapan saya adalah untuk ke depan, tolong di perhatikan supaya agak awet kita punya aset sehingga bisa dipakai agak lama.

Kalau Ibu, ya cukup lah, Bu, pokoknya saya udah ngerasain puting beliung segala macam udah kerasa. Nah, itu informasinya dari Ibu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam.

Sudah selesai?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Willem, silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Sedikit saja, tambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Dewo tadi, bahwa memang masa kepemimpinan Pak Kepala BMKG yang, eh, Basarnas yang lalu pernah saya audiensi ke ruangnya ruang kerjanya Pak Kepala Basarnas yang lalu. Pernah saya ngobrol diskusi dengan beliau terkait dengan bagaimana kita bentuk tim relawan terutama di Dapil saya itu kan di sana memang agak ekstrim cuacanya baik di laut, di darat, maupun juga di udara, sering terjadi insiden di sana.

Supaya dapat mempermudah kerja-kerja tim Basarnas di sana tapi rencana itu tidak, belum, di laksanakan beliau sudah pensiun, semoga bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan, Pak, sekarang, sekian terima kasih.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, bisa saya tambah.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, silakan.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kepada BMKG ya saya lupa. Tadi nyambung pertanyaannya Bu Cen, yang Kepala BMKG tidak *update* terhadap apa itu, *loan*, ya, *loan*, pinjaman luar negeri. Sesungguhnya pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh BMKG ini untuk belanja apa, ya kan, itu *loan*-nya terhadap negara tertentu ataukah ini kepada KSA (Kreditor Swasta Asing), itu ya. Itu mulai tahun berapa gitu dan tahapannya sampai mana, apakah sudah *blue book*, apakah sudah *green book* ya, apakah masih *green book* tapi belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, gitu ya.

Kalau itu semuanya sudah berjalan, sudah ada kontrak pinjaman luar negerinya atau belum, kalau sudah kontrak pinjaman luar negeri mengapa sampai sekarang barang tersebut belum direalisasikan dan kira-kira kendalanya apa.

Juga tolong disampaikan seberapa besar *urgent* alat tersebut ya. Kalau memang alat tersebut memang dianggap sesuatu yang *urgent* kemudian belum sampai direalisasikan sekarang ini, apakah ada sesuatu yang terjadi ya di luar dari harapan kita, apakah mitigasinya menjadi tidak detail menjadi tidak akurat atau bagaimana dengan keterlambatan alat tersebut. Dan, dengan adanya alat tersebut, itu mitigasinya akan menjadi lebih akurat, lebih cepat, atau lebih detail, atau bagaimana, ya, karena terus terang saya juga menyangkan yang terjadi di BMKG itu.

Harusnya secara detail itu bisa dibaca dan sistem komunikasinya, sistem mensosialisasikan, penyampaian informasinya kepada masyarakat itu juga harus terbangun dengan baik, ya, terbangun dengan baik. Jadi jangan hanya *share* apa itu di WA grup di WA grup, barangkali ada satu strategi yang tepat untuk menyampaikan informasi.

Ini mumpung saya ingat, ya, ini saya sampaikan kepada Basarnas. Kemarin dari Kecamatan Kabupaten Bogor Bojong Timur ya, mana itu Bu Nunik, Bojong Kulur Pak Kepala Basarnas. Di sana itu terjadi bencana banjir besar rutin tiap tahun Pak yang bisa dikatakan skalanya lebih besar jika dibandingkan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tapi kejadiannya itu di desa, dampaknya terhadap 125.000 warga sekitar 50.000 KK, ini kan berarti besar dampak itu.

Kemudian, dia membangun satu paguyuban atau komunitas perduli sungai Bojong Kulur ya, di mana ada banjir di hulu kemudian orang hulu itu langsung kasih informasi kepada orang di hilir lewat telepon itu supaya dia siap-siap bahwa banjir datang begitu. Nah hal yang semacam itu kan menjadi tanggung jawabnya Pemerintah ya.

Dalam forum ini saya hanya memberikan masukan supaya mereka dapat perhatian dari Basarnas, dan BMKG mungkin juga tidak detail membaca kondisi cuaca di lokasi tersebut sehingga terjadi banjir dadakan. Nah, itu apakah juga terpengaruh terhadap alat yang sedang dibelanjakan tapi tidak segera kunjung realisir, terelaisir, ini kan semuanya akan bisa menjadi pemikiran gitu.

Yang terakhir kepada BMKG saya ingatkan ya saya ingatkan tapi ini saya mengingatkan saja supaya nanti ke depan menjadi satu pemikiran. Janganlah membuat satu persyaratan tender dengan satu spesifikasi tertentu sehingga pada akhirnya yang bisa mengikuti tender hanya satu bendera. Kalau hanya dikerucutkan supaya satu bendera atau bendera tersebut, itu motivasinya sudah bisa terbaca dan itu adalah melanggar Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Saya ingatkan aja supaya itu tidak terjadi, karena yang menang A tapi yang ngerjakan B, dan B itu bukan orang Indonesia gitu ya, saya juga memantau semuanya itu.

Saya kira demikian, Pimpinan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Bapak Ibu Anggota Komisi V yang telah memberikan respon terhadap paparan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas pada hari ini.

Yang pertama, kemungkinan anggaran tidak sesuai harapan. Sebaiknya memang Basarnas itu ya, Pak, Basarnas itu menyampaikan kepada Komisi V,

ini Renstranya. Untuk bisa mencapai Renstra itu segini jumlahnya, sekian Triliun jumlahnya, kemudian dicicil oleh Menteri Keuangan per tahun, sehingga mencapai yang dikehendaki sesuai Renstra.

Ini saya lihat Renstranya cuma setahun-setahun, mana bisa naik. Tahun 2004, 2024 kita tidak tahu berapa kebutuhan Basarnas sesungguhnya, jadi idealnya begitu. Kalau punya Renstra seperti itu semestinya kita menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan di sini. Jadi Bapak Ibu memaparkan di sini, Komisi V kemudian mendukung sehingga tercatat di dalam Bappenas maupun Kementerian Keuangan, itu yang, ya pertama yang saya mencoba meraba-raba di mana sampai Basarnas bisa turun. Ya, kalau kebutuhan ya butuh terus seperti kata Pak Sudewo tadi, barangnya itu-itu saja dan seterusnya.

Jadi, kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan Renstra beserta anggarannya per tahun, nggak bakalan naik, saya 11 tahun di Badan Anggaran. Dulu BIN itu anggarannya cuma 5 Triliun, sekarang sudah 12 Triliun. Dulu, ini 2019 anggaran mereka, Kominfo 5 Triliun, sekarang sudah 22 triliun. Jadi, sasaran tuh jelas sasarnya ke mana duitnya berapa. Kalau begini-begini ya sekedar Komisi V, begini-begini memperjuangkan begini-begini.

Perjuangan itu, Bu, sekarang, di masa pembicaraan pendahuluan semacam ini. Kalau nanti setelah pengantar nota keuangan itu sudah di *closed*, paling nanti berharap dari PNB-PNB. Maka itu kalau ingin meningkatkan anggaran, saya sarankan utuk bisa memaparkan di hadapan Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Ya Komisi V bisa saja mengundangnya setiap saat, bukan dengan cara-cara yang *sporadis* semacam ini, ini tumpuk-tumpuk kertas begini, terus menerus seperti ini.

Nah, kemudian yang kedua tentu kita mengharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa itu transparan. Kalau barang-barang yang sampaikan Pak Sudewo tadi, itu-itu saja, patut diduga pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap anggaran. Kalau barang itu-itu saja kemudian tahun depan muncul lagi barang itu saja, itu harus *multiyears*. Kalau tidak *multiyears* berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Nah, ini kan masih dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sampai Tahun 2022, ini kan mereka-mereka baru pulang dari Badan Anggaran. Mulai Tahun 2023 tidak ada lagi defisit keuangan negara melebihi 3%, kalau melebihi 3% itu berarti sebuah negara yang gagal dan melanggar Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Tahun depan tidak ada lagi *refocusing*, yang ada cuman sampai tahun ini. Menteri Keuangan tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, termasuk PTUN jika dia melakukan *refocusing*, penghematan atau pemotongan anggaran.

Jadi kita berharap bahwa Tahun Anggaran 2023 ini betul-betul yang disampaikan oleh dari yang senior-senior Pak Sudjadi kemudian Pak Sudewo dan Pak Willem, kemudian yang lain-lain, bagaimana menghadapi tahun politik bermanfaat bagi daerah pemilihan Anggota Komisi V. Saya terang-terangan

saja, pelatihan gitu, ya, nggak apa-apa. Misalnya saya dari partai yang berwarna hijau, nanti kader saya dikasih baju *oranye* seperti Bapak Basarnas, dikira orang berbeda partai.

Tapi yang penting itu tadi, tolong nanti sebelum definitif, Bapak Ibu sekalian bisa meminta data ke Sekretariat Komisi V, Dapil kita-kita ini di mana saja, agar tidak salah sasaran.

Ya, silakan selanjutnya untuk menanggapi dari yang suaranya nyaris tidak terdengar sampai dengan,

*Ikan kakap ikan gabus,
Banyak cakap tapi tidak bagus.*

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih sekali kepada Pimpinan Komisi V DPR RI dan para Anggota Komisi V DPR RI atas masukkan dan beberapa pertanyaan dan mohon izin kami untuk apa menjelaskan beberapa hal yang tadi dipertanyakan.

Mohon izin kami, saya, memulai dari yang paling mendasar menurut kami adalah filosofi atau Renstra, Renstra apa target capaian apa yang sebetulnya menjadi dasar kenapa kok belanjanya menjadi seperti ini. Mohon berkenan untuk Renstra itu memang wajib dipaparkan pada saat kami mengusulkan anggaran, mohon, mohon bisa ditayangkan sekilas saja bahwa Renstra kami itu sebetulnya selalu menjadi dasar usulan anggaran di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Nah, ini sebetulnya jangka panjang sampai 2045 tapi fokus sekarang yang di 2020-2024. Nah, untuk ini alasan utama di Tahun 2018 saat itu, mohon maaf saya baru masuk di BMKG dan kami melakukan *self* audit, kami lihat semua kami audit internal bagaimanakah performa BMKG ini di level dunia. Saat itu kami cocokkan dengan Japan Meteorological Agency dan ternyata di Tahun 2018 BMKG itu setara dengan Japan Meteorological Agency Tahun 1998, artinya kami ketinggalan 20 tahun, itu di Tahun 2018, Januari.

Nah, dampak dari ketinggalan 20 tahun ini kami peringatan dininya terlambat 2 menit karena Jepang memberikan peringatan dini tsunami mampu 3 menit setelah gempa terjadi. BMKG yang teknologinya kapasitasnya saat itu anggarannya 1,7 Triliun, itu mengakibatkan peringatan dini kami 5 menit, jadi telat 2 menit.

Nah, jadi Renstra ini disusun antara lain adalah untuk mengejar ketinggalan 20 tahun tadi. Sehingga teknologi apa yang harus dikembangkan di Tahun 2020 itu adalah seluruh infrastruktur. 2021 misalnya pengembangan metode analisis dan seterusnya, nah, 2022 saat ini memulai basis teknologi dan itulah yang menjadi dasar kenapa kami menggunakan *loan* karena kalau

tanpa *loan* dengan APBN, apa *recharging* pengembangan lompatan teknologinya juga kami tidak apa kurang cepat, demikian.

Sehingga 2023, 2022 kami ada *loan*, yaitu *loan* yang pertama adalah untuk modernisasi maritim, ini kami juga ketinggalan. Nah, ini dengan teknologi Bappenas apa memutuskan Prancis.

Kemudian selanjutnya kami ada *loan* juga dari Bank Dunia, itu untuk mengejar 20 tahun ketinggalan dengan Jepang. Nah, ini yang disebut IDRIP tadi proyeknya, sehingga angka-angka yang kami susun.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Maaf Bu, kalau dengan Chili?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Chili kami belum Pak, belum mohon maaf. Jadi sementara mohon izin tadi mungkin karena waktu kami tidak sempat menceritakan ini.

Jadi yang bisa kami lakukan adalah dengan Jepang, eh maaf mohon maaf. Dengan Prancis, kemudian dengan Bank Dunia dan segera kami memulai dengan Finlandia, karena Finlandia itu sangat unggul di dalam penerbangan. Nah, ini masih dalam apa *green book* ya, Finlandia *green book* nya sudah masuk. Jadi level nya kalau Finlandia itu *green book*, kalau yang IDRIP, Bank Dunia, dan yang Prancis ini sudah sampai lelang dan sudah berjalan Bapak Ibu, proyeknya sudah berjalan, alat-alatnya sudah mulai datang, sistemnya yang dibangun. Jadi, utamanya membangun sistem, jadi alat itu sebagai pelengkap begitu.

Jadi demikian Bapak Ibu sekilas, mohon maaf saya dan nanti akan terlihat Mbak kalau ada tayangannya contoh saja tiap tabel itu kelihatan Tahun 2021 radar butuh berapa, 2023 radar butuh berapa, jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan.

Nah, kemudian.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya Bu, Renstranya sudah ada.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Sudah ada, Pak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya tapi duitnya kagak muncul.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Ada duit.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Yang perlu itu Renstranya segitu duitnya berapa.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Ada Pak mohon izin, mohon izin, karena waktu tadi kami tidak menyangkan. Tolong ditayangkan uangnya kelihatan Tahun 2020 berapa, uang ini, ini kan beda, yang tabel ada. Jadi dasarnya adalah jumlah alat bukan uang Pak, jumlah alatnya dibutuhkan berapa, nanti uangnya mengikuti jumlah alat itu berapa. Di dalam laporan ini kami sampaikan juga di sini tiap tahun ini ada sekilas di halaman 17, di halaman 17 itu katakan Tahun 2020.

Nah ini, ini baru indikator capaiannya, ini contoh tapi sebetulnya komplitnya dokumennya itu ada jumlah alatnya. Nah, Tahun 2020 akurasi 86%, ya akurasi 86%, 2021 akurasinya meningkat, dan sampai Tahun 2023 kami mencanangkan 89%, nah ini. Jadi, uangnya setiap tahun ada dan inilah sebabnya kami menghitung *backlog*, sebentar tadi ada *backlog-backlog* ini di *slide* nomor 21.

Nah, ini kami menunjukkan Renstra itu yang ungu, Bapak, mohon izin ini. Jadi, Renstra 2019 itu berdasarkan jumlah alat dan sistem utamanya *backbone* nya itu sistem. Alat adalah kelengkapannya untuk mengejar apa 20 tahun tadi anggarannya usulannya sekian 2,9T tetapi mendapatkan 2,6 dan seterusnya. Nampaknya Renstra itu memang tidak pernah tercapai Bapak, jadi yang biru itu Renstra semua, Bapak. Jadi Tahun 2022 kami Renstranya 3,584, itu Renstranya, namun kami mendapat 3,1. Dan Tahun 2023 Renstranya 3398, jadi memang selalu *backlog*.

Nah, inilah yang menjadi strategi. Kemudian di pertengahan perjalanan diwarnai dengan peningkatan ekstrem yang bertubi-tubi. Jadi, Renstra udah kita siapkan ternyata ekstrimnya juga semakin ini. Nah, sehingga inilah dan kebetulan memang ada *refocussing* dan inilah yang mengakibatkan kenapa tadi ada beberapa pertanyaan, kami merubah angka kami langsung ke pertanyaan tadi.

Misalnya di *slide* nomor 24 ini tadi ada pertanyaan, layanan informasi gempa bumi. Nah, di sini peringatan dini tsunami total anggarannya 24 Miliar.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke sana kawan-kawan, ini Renstra ini sudah pernah dipaparkan Ibu belum di sini bersama duitnya dari awal.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Tiap, tiap laporan seperti ini kami tayangkan di dalam *slide*.

KETUA RAPAT:

Nggak, maksud saya dari tahun Ibu bikin Renstra itu pernah nggak di, maaf Bu saya baru.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Setiap mulai Tahun 2019 tadi 2019 ya.

KETUA RAPAT:

Paparannya di Bappenas sama Menteri Keuangan saja tapi di Komisi V nggak?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Kalau di Komisi V kami petik bagian. Jadi misalnya tidak, tidak lengkap.

KETUA RAPAT:

Nah itu Bu seharusnya dari awal Ibu, misalnya seperti ini jumlahnya berapa.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Oh oh bukunya sudah, bukunya sudah, Tahun 2020 ya Tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Kalau buku itu, Bu, tidak jadi, tidak bisa jadikan lembaran berita negara.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Oke baik, jadi kami kalau akan apa kami petik setiap akan seperti saat ini, ini di *slide* tertentu kami petik dari Renstra itu. Namun kalau itu kurang kami siap untuk memaparkan, mohon waktu, karena terus terang memang waktunya tidak, ini persoalan di waktu saja. Jadi ini tapi kalau misal saya paparkan mungkin habis untuk paparan Renstra, begitu Pak. Jadi memang kami berusaha mengisi di situ Pak kalau diberi kesempatan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, ini Renstra apa ini Pak? Renstra apa, Renstra untuk kerja BMKG atau Renstra yang belanja barang *loan* itu tadi?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Oh bukan bukan, ini Renstra BMKG. Nah, persoalan belanja barang dan *loan* itu hanya strategi bagaimana untuk mewujudkan Renstra itu terjadi karena tanpa *loan* itu pencapaiannya faktanya selalu di bawah, selalu, dan teknologinya suntikan teknologinya itu juga ya itu tadi nyatanya dengan APBN kita terlambat 20 tahun, Pak.

(rekaman kurang jelas) akselerasi.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, saya ingin tahu ya bagaimana caranya BMKG membuat Renstra ya, variabel-variabel yang dipakai Renstra itu apa? Karena sesuatu yang akan terjadi itu, itu sulit untuk diprediksikan gitu, memang bisa untuk dikualifikasikan bahwa itu masalah mitigasi, masalah meteorologi, masalah geofisika, gitu ya. Tetapi kan itu sulit untuk diprediksikan secara presisi begitu, lantas kalau dibuat semacam Renstra berarti ada sesuatu pada waktu tertentu harus tercapai ini, waktu tertentu yang jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang ini.

Nah, rasanya sulit untuk membuat satu gambaran apa yang akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, satu tahun yang akan datang aja sulit untuk kita prediksikan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa dalam perjalanannya itu ternyata ada cuaca-cuaca ekstrim yang muncul gitu kan.

Lantas membuat satu Renstra merencanakan sebuah program strategi untuk jangka waktu tertentu ini variabelnya apa supaya Renstranya itu tidak jauh. Kalau itu yang dianggap sebagai perencanaan untuk belanja barang tertentu yang akan mengejar ketertinggalan 20 tahun dari Jepang tersebut mungkin mudah untuk diprediksikan, ya, bahwa karena barang ini baru datang sekian persen untuk satu tahun, sekian persen sekian jumlahnya untuk tahun yang ke-2, sehingga itu bisa pada titik tertentu akan mencapai, mencapai target seperti yang akan terjadi di Jepang gitu kan, gitu.

Coba yang kedua, kalau memang yang menjadi patokan adalah Jepang tapi belanjanya adalah Perancis, teknologinya Perancis. Ini kira-kira dengan belanja Perancis teknologi Perancis betul nggak, bisa mengejar ketertinggalan 20 tahun Jepang karena pedomannya Jepang belanjanya Perancis gitu kan. Kalau pedomannya Jepang belanjanya Jepang, teknologinya Jepang, mungkin masuk akal.

Tolong dijelaskan.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Betul sekali, Bapak Sudewo, terima kasih ini.

Jadi memang benar sangat sulit untuk memprediksi apa jangkauan sampai lima tahun ke depan. Sehingga kami berbasis pada negara paling maju itu mana di sini, ya ada Jepang, ada Perancis, ada Amerika. Dan, sehingga yang paling ketinggalan kita dengan mana, ternyata paling ketinggalan jauh itu dengan Jepang, Bapak.

Nah, sehingga Jepang itu khususnya terutama untuk gempa bumi dan tsunami itu, sehingga kami dasarnya karena sulitnya memprediksi sehingga kami berprinsip pokoknya kalau sudah seperti Jepang, apapun yang terjadi *Insha Allah* lebih baik. Nah, ini mungkin tidak tepat ya, tapi demikian.

Kemudian kami ada *midterm review*, Pak, jadi setelah diprediksi dengan perjalanan waktu sampai sekarang sudah tahun ketiga, itu kami merevisi Bapak. Ada sesuatu yang wah, ternyata kok bencananya lebih dahsyat, akhirnya kami menambahkan dari Renstra, kami sedang menyiapkan revisi Renstra karena ada kejadian itu.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Bentar, Pimpinan bentar, sambung lagi.

Kalau memang itu Jepang, alasannya seperti yang disampaikan. Kenapa belanjanya dan teknologinya tidak Jepang.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Ya, nah, jadi untuk gempa bumi kami tidak *loan* dengan Jepang. Kami mendapat pendampingan *technical assistant* dengan Jepang tapi kami tidak menerima dana, Pak, jadi Jepang itu nempel kami terus. Nah, *loan* itu adalah untuk maritim, Bapak, bukan untuk gempa bumi.

Jadi kalau kami gempa bumi, kami *partnemya* Jepang, tetapi kadang-kadang Amerika juga, tapi tidak dalam konteks *loan*, Bapak, jadi ada metode yang lain selain *loan* yaitu langsung tenaga ahli-tenaga ahlinya langsung datang *hands on* dan kami di *training* di sana dan tidak melibatkan aliran dana.

Nah, dengan Perancis itu yang ketinggalan adalah cuaca maritim Bapak. Nah, kenapa dengan Perancis, sebelum, mohon maaf sebelum saya di BMKG itu ternyata sistem meteorologi maritim di BMKG itu sudah terbangun dan itu teknologinya Perancis. Dan, sistem ini, saya kan berkonsultasi dengan Kepala BMKG sebelumnya. Poinnya kalau sistem ini akan dibangun harus kompatibel, jadi jangan *jeglek* karena kalau tiba-tiba berubah itu layanan akan terputus akan *shut down*.

Jadi ini sistem sudah terlanjur terbangun, sehingga yang Perancis ini adalah *strengthening*, makanya judulnya *loan* itu kan *strengthening project*. Jadi ini untuk menguatkan, kenapa Perancis, karena yang sudah terbangun *backbone* nya itu Perancis. Kalau misalnya saya akan merubah dengan yang lain risikonya adalah akan putusnya operasional itu.

Nah, kemudian untuk gempa bumi ini makanya kami selain bantuan dari Jepang secara *technical assistant*, World Bank yang memberi anggaran. Nah, ini teknologinya bebas, kami bisa pilih Perancis, eh maaf, kami bisa pilih Jepang, bisa pilih Amerika, yang maju itu World Bank. Jadi, selama ini, itu yang yang terjadi, Bapak. Mohon maaf sekilas karena tadi saya tidak sempat menjelaskan saat paparan.

Demikian mohon berkenan, kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana Bapak, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Saya sedikit, Bu.

Mungkin kalau, Mas Dewo udah jelas ini, udah nyambung, penjelasan udah nyambung belum?

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya sudah saya serahkan Ketua saja, saya udah terlalu lama berdebat.

KETUA RAPAT:

Nggak, maksud saya pertanyaan, kalau saya tangkap Mas Dewo belum nyambung ini.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Belum nyambung.

KETUA RAPAT:

Belum nyambung kan?

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Belum.

KETUA RAPAT:

Belum nyambung, belum nyambung, nah saya nangkapnya belum nyambung. Mas Dewo ini harus sampai nyambung baru berhenti, Bu.

Jadi maksudnya begini Bu sebentar ya, maksudnya begini. Kan tadi beliau bicara teknologi bukan bicara sumber biaya. Nah, kalau teknologi kita kan ngacu ke Jepang misalnya gitu ya, tapi peralatan yang dipakai itu kan bukan peralatan yang digunakan oleh Jepang, kan gitu maksudnya Mas Dewo tuh. Harusnya kan menggunakan teknologi yang digunakan oleh Jepang. Pertanyaannya, apakah di dalam ketertinggalan, apa namanya terkait dengan gempa tadi ya, ini gempa nih masuk geofisika, Bu, ya geofisika kan.

Kalau geofisikanya kita tidak mengacu ke Jepang, teknologinya tidak pakai teknologi yang diterapkan Jepang atau peralatannya dipakai oleh Jepang, tentu ngapain kita ngacu kepada Jepang, kan itu pertanyaannya.

Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, apakah dalam konteks geofisika ini kita menggunakan teknologi yang sama gak dengan yang dipakai oleh Jepang, itu pertanyaannya.

Yang kedua soal geofisika, eh soal meteorologi, kita ngacu ke Perancis kan Bu ,ya. Nah, peralatannya kan sudah konek ya udah sudah terintegrasi kan Bu ya, sudah terintegrasi belum Bu kita punya seluruh Indonesia ini?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Proses.

KETUA RAPAT:

Proses? Tapi belum terintegrasi? Belum 100% terintegrasi, ini belum 100% Pak, terintegrasi. Saya sudah hampir masuki masa ke-15 tahun nih Bu di sini, agak kaget juga dengar Ibu bilang ini, sampai segini tahun kita belum terintegrasi teknologinya. Ini saya tahu, Bu, ya saya tahu betul proses pengadaan barang dan jasa di tempat Ibu sana, ini ada masalah juga di sini sebetulnya, ya.

Harusnya peralatan yang kita beli hari ini dengan yang kita beli besok lusa dan seterusnya, harusnya perakatan yang menuntun kita kepada mempermudah terintegrasinya sistem yang dibangun di BMKG itu, kan itu yang ditanyakan oleh Pak Dewo tadi kalau saya bisa tangkap, ya. Apa kelebihannya ketika terintegrasi, pasti pelayanan jauh lebih baik, Bu, ya komunikasi bisa lebih cepat karena dia sudah terintegrasi, nah layanan pasti lebih baik.

Nah, terkait hal ini mungkin Mas Dewo nggak bisa kita dalami sekaligus di sini. Saya tawarkan ini kita diskusi khusus aja nanti, ya, karena kali ini kita lebih fokus kepada RKA K/L. Pesan moral dari kita, Bu, ya kalau tidak boleh pesan anggaran, pakai pesan moral saja. Kita berharap alat yang akan Ibu adakan nanti fokus gituloh. Kita pakai Jepang teknologi Jepang, kalau kita pakai Jepang kita ngacu ke Jepang pakai teknologi negara lain alat ukurnya apa? Kan nggak bisa kita mengukurnya Bu sejauh mana kita tertinggal dari Jepang ketika kita tidak menerapkan teknologi dari Jepang, kan itu Pak Dewo tadi maksudkan.

Kita pakai alat dari Perancis tapi kita tidak menggunakan terintegrasi pakai sistem yang digunakan oleh Perancis, bagaimana kita mau mengukur bahwa kita itu mau mendekati Perancis atau belum, itu yang kita maksud. Bukan sumber biayanya Bu, kita tidak bicara pembiayaan di sini, kita bicara peralatan dulu, bicara teknis, bicara hal teknis di lingkup barang dan jasa yang ada di BMKG, ya.

Seperti yang saya bilang tadi, kami sudah lama di sini, sudah sekian banyak Kepala BMKG kalau saya ini, Bu, ya yang saya bertemu di sini.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Saya belajar dari Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya saya sudah puluhan tahun di sini, Bu, ya. Jadi kita tahu, Bu, kami mengamati dari tahun ke tahun. Apalagi saya kan dari awal udah Pimpinan terus di sini, pasti saya amati lah seluruh Kepala BMKG, Kepala Basarnas, bagaimana sistem manajemen yang dijalankan di sana, memang itu tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dan seterusnya itu loh.

Kita kan mitra ini, ya walaupun terkadang Bu kami ini terpaksa mengurangi sedikit banyak bicara, ya. Biasanya kalau Ketua bicaranya satu menarik oleh Anggota itu bisa jadi 10, Bu, ya. Jadi saya buka saja ya mudah-mudahan nanti kita bisa apa nama alokasikan waktu khusus untuk kita dalam ini, Mas Dewo.

Kita cek dari ujung ke ujung, misalnya stasiun cuaca di Aceh pakai produk mana *tales* atau apa gitu kan, nah gitu loh. Nanti kalau di Kalimantan sana di titik mana saja Kabupaten mana Provinsi, kita cek semua, nanti Ibu petakan saja ya, peralatannya apa, sejauh mana sudah terintegrasi, yang mana yang belum terintegrasi, apa peralatannya, tahun berapa pengadaannya. Ya kan kita bisa kejar itu, kan di BMKG ini kan saya rasa ini kan pegawai-pegawai BMKG ini kan orang karir semua kok, nggak ada orang politik di sana.

Pasti mereka tau jalan ceritanya, barang ini kenapa tidak, misalnya beli alat ditaruh di sini, kenapa kok nggak bisa terintegrasi, ternyata ini beda barangnya. Kalau udah beda merek udah pasti beda teknologi, Bu, kenapa bisa begitu, bagaimana kita mau mengejar terintegrasi dan ini masa siapa. Bisa kita kejar ini Mas Dewo, Pak Hamka bisa kita petakan.

Jadi kalau menurut saya, saya tawarkan yang ini kita sudahi dulu di sini ya. Nanti kita lokasikan waktu khusus saja.

Saya kembalikan kepada Pak Tamliha, Pimpinan rapat.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Silakan lanjut.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, ada tambahan sedikit, Pimpinan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Silakan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Presiden itu kan punya target bahwa IKN 2024 itu, harus sudah dimulai pemerintahan di sana meskipun masih bertahap begitu. 2024 berarti 2023 itu ada sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa di sana. BMKG saya lihat dalam rencana kerjanya tidak menyinggol sedikitpun soal IKN.

Jadi saya pertanyakan, apa sesungguhnya tidak menyinggol IKN sama sekali gitu. Membuat satu stasiun baru di IKN misalnya, menaruh peralatan apa di sana begitu, tapi tidak kelihatan sama sekali gitu, coba dijelaskan.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih, masukan-masukannya *alhamdulillah* perhatian Bapak Ibu sangat apa bagus sekali.

Tentang IKN kami merencanakan ada pembelian peralatan ya, Pak, ya untuk mendukung IKN, jadi ada terutama untuk penerbangan ya. untuk penerbangan ini karena kan vital sekali harus akurasi 100%. Kemudian selain itu untuk konstruksi kami menyiapkan kegiatan pemetaan mikrozonasi gempa bumi, karena di sana akan segera dibangun bangunan-bangunan penting bangunan-bangunan negara, zonasinya memang harus dipetakan secara lebih rinci zona merah mana, *building code*-nya harus bagaimana.

Jadi demikian, Pak, gitu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Lanjut, Bu, dengan pertanyaan yang lain.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Oh baik, untuk pertanyaan yang lain terima kasih. Ini tadi ada berapa pertanyaan kenapa kok anggarannya berkurang antara lain di halaman sebentar, di halaman 24 Bapak Ibu. Di sini layanan informasi gempa bumi dengan peringatan dini tsunami yang berkualitas, mohon tayangannya bisa ditayangkan di *slide* 24.

Mohon izin, itu kolom sebelah kiri SB, 24, Mbak. SBPI ini kan Pagu Indikatif, nah, yang sebelah kanan itu termasuk pengurangan ini adalah hasil dari trilateral *meeting* Bapak Ibu. Jadi bukan kemauan BMKG sendiri tetapi adalah hasil konsultasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah, pengurangan ini terjadi karena kami mengupayakan penghematan. Kalau yang asli 24 Miliar, itu, menggunakan satelit dan ternyata itu sangat boros

pemeliharaannya karena membayar biaya sewa komunikasi satelit itu tidak *sustainable*. Sama ya Pak ya.

Nah, sehingga kami mengubah teknologinya tidak menggunakan satelit tapi berbasis web dan akhirnya bisa diperoleh hasil yang kurang lebih sama. Sehingga alokasi anggaran 5 Miliar, penghematan kami masukkan ke sekolah lapang. Sehingga sekolah lapang bisa bertambah karena mengalihkan anggaran satelit sewa komunikasi ke sekolah lapang. Nah, kenapa itu kok seperti tidak masuk akal yang tadinya 208, tiba-tiba menjadi 2.880.

Mohon izin, juga mohon saran, arahan, karena kami menghitung, Ibu seharusnya yang harus kami bina sampai Tahun 2030 itu kalau jumlah petani dan jumlah nelayan itu sekitar 25 Juta. Kalau setiap tahun kami hanya 208, itu sampai 2030 tidak akan terwujud. Sehingga, kami harus *nggenjot* menjadi ribuan agar segera terwujud akselerasi. Oleh karena itu, kami menargetkan 2.880 dengan metode yang bervariasi, tidak semuanya seperti yang disampaikan Bapak Sudjadi tadi, tidak semuanya, tapi yang untuk anak-anak SD anak-anak sekolah tentu metodenya berbeda yaitu lebih ke BMKG *goes to school*, jadi lebih *massal* melalui guru melalui ini.

Jadi 2.880 itu melibatkan juga anak-anak sekolah, tidak hanya petani, tidak hanya nelayan, demikian. Jadi, metodenya memang kami sesuaikan, tetap tidak meninggalkan metode yang sudah berjalan yang tadi, apa, sekolah lapang yang dikawal 3 bulan, itu tetap berjalan, jadi itu mohon izin.

Kemudian, ada pertanyaan tentang akurasi, akurasi misalnya meteorologi 91%. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya bagaimana, sesuai tadi yang ada dalam Renstra. Tahun sebelumnya itu, oh tahun ini berarti, tahun ini hanya 90% Ibu, Tahun 2021 hanya 89,7%. Analog dengan klimatologi target 83%, tahun ini hanya 82%, tahun sebelumnya 81%.

Kemudian, ada pertanyaan, kenapa klimatologi kok jauh banget bedanya. Nah, memang secara analisis klimatologi ini durasi prediksinya itu jauh 10 harian sampai satu bulan. Jadi, kemungkinan *error* meleset itu akan lebih besar makanya akurasinya juga merosot. Tetapi, kalau meteorologi itu prediksinya paling lama 7 hari kemungkinan, lalu diulang-ulang sampai 3 hari sampai 3 jam sebelumnya, sehingga akurasinya bisa melompat. Bahkan untuk penerbangan akurasinya 100% karena itu bukan prediksi tetapi langsung *realtime* mengukur alat.

Jadi, demikian apa, mohon berkenan.

Kemudian, tadi juga yang tentang *Toa*, saya sangat berterima kasih Ibu dan Bapak menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu perlu didukung.

Bagaimana, Bapak? Mohon maaf, jadi ini sejarahnya. Bukan, Bapak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Bukan, *Toa*, apa pantai itu yang nyaris tidak terdengar itu.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Sirine, sirine, mereknya *Toa*.

Tapi aslinya, Pak, dalam sistem peringatan dini yang dibangun Tahun 2008 sirinenya itu adalah sirine impor, suaranya kenceng dan lantang tapi sekarang sebagian besar sudah *aus* dan pabriknya sudah tidak menjual apa tidak menjual *spare part*-nya. Sehingga, kami mengevaluasi bahwa teknologi itu rasanya karena Pemerintah Daerah nggak bisa memelihara, alatnya terlalu canggih jadi tidak berkelanjutan dan menurut.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Interupsi Pimpinan, sebelum saya lupa.

Saya dari tadi *angen-angen* dari satelit dirubah ke *Web*. Kalau kemudian ada gempa besar *Web*-nya terus mati gimana.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Nah, kami kami begini, begini, yang satelit tetep ada, yang *Web*, jadi begini, alat itu kan kami pasang di BPBD-BPBD yang tugas utamanya memencet sirine itu adalah BPBD, itu tetap satelit, Ibu, tetapi yang lain-lain misalnya ada hotel yang minta, ada organisasi yang minta, yang meminta selain BPBD itu ternyata banyak sekali ada pramuka, ada PMI, ada banyak sekali.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Oke mohon maaf, mohon izin, Pimpinan. Jadi maksudnya, satelit yang selama ini digunakan masih tetap digunakan, ditambah dengan menggunakan *Web*.

KETUA RAPAT:

Iya iya iya, namun khusus yang Tahun 2023, tidak ada, jadi *Web*, jadi apa terutama *Web* karena BPBD nya sudah hampir sebagian besar terpenuhi itu, Tahun 2023 itu. Jadi demikian terima kasih Ibu Estu dibantu menjelaskan.

Izin kami lanjutkan.

Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang *Toa*, Ibu, saya mohon maaf juga. Sirine ini kendalanya sudah tidak ada yang memproduksi dan Pemerintah Daerah tidak sanggup untuk memelihara karena menurut peraturan Mendagri yang menyediakan sirine itu bukan BMKG, yang menyediakan adalah Pemerintah Daerah, Bu.

Jadi, mohon maaf kami terpaksa juga, harusnya kami tutup mata tetapi kami tidak tega, Bu, kami melihat masyarakat yang, yang rentan dan Ibu tadi *pangandikan* Pemerintah Daerah kurang peduli. Sirine-sirine itu tidak ada, Ibu. Nah, sehingga kami menggunakan sirine rekayasa bukan *made in* pabrik, Bu tetapi itu *made in* UMKM, bengkel-bengkel begitu.

Nah, sehingga memang tidak selantang sirine yang impor itu, memang demikian, Ibu tetap, dan kami tetap berupaya kemarin meminta agar diganti, belajar dari Basarnas, klakson kapalnya itu lantang sekali Basarnas. Kami apa berencana untuk membantu mengganti dengan klakson kapal, ini inspirasi dari Basarnas, demikian.

2022 sudah mulai, tahun ini sudah mulai, tapi belum semua dan kami terhalang tidak bisa menganggarkan masif, Bu, karena itu sebetulnya ranahnya Pemerintah Daerah. Kalau peringatan dini yang tadi Web atau satelit itu BMKG, tetapi kalau sirine itu semestinya tidak Ibu, semestinya tidak, tetapi, ya, kami usahakan.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan.

Bu, kalau itu memang ranah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tahu nggak kalau itu memang kewajibannya?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Tahu, tahu, Pak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Apa, apa, Kepala BMKG sudah pernah ber kirim surat kepada Pemda supaya itu disediakan.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Selain ber kirim surat, *face to face* dengan Gubernur, dengan Bupati, sudah berkali-kali, Bapak. Makanya kami tidak tega kalau menunggu itu turun keburu tsunaminya datang, nggak ada sirine sama sekali begitu, Pak. Jadi ya memang tidak ideal tetapi saya rasa lebih baik demikian karena daripada lempar-lemparan.

Demikian, Pak, ya mohon maaf kalau tidak maksimal begitu.

Nah, namun, namun, kami juga melihat fakta di lapangan, Bapak, sering atau beberapa kali terjadi saat peringatan dini itu dikirimkan oleh BMKG ke daerah, karena medannya seperti di Trenggalek itu, Bu, beliau bergunung-gunung itu sirine yang dipencet oleh Pemerintah Daerah dari kantornya yang di kota itu belum tentu bisa membunyikan yang ada di lapangan, di pantai, karena kendala gunung-gunung medan itu.

Jadi sehingga, menurut kami sirine itu memang sebenarnya kurang efektif. Sehingga kami mengusulkan, apa membangun metode yang baru yaitu belajar dari Jepang sekali lagi, belajar dari Jepang peringatan dini adalah goyangan gempa itu sendiri. Sehingga kami mengajarkan dalam SLG pengganti sirine adalah.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Interupsi, Pimpinan, saya kok jadi ini lagi, boleh, Pimpinan?

Begini, Bu, kalau ini mengandalkan ketika terjadi gempa bahkan mau tsunami kemudian sirine itu dipencet di.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Di Kantor.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Kantornya.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Betul, Bu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Apa nggak ada yang modelnya otomatis, begitu ada guncangan atau ada mulai ada ombak yang ini, mungkin ada apa, air, air laut yang mulai surut, apa itu tidak bisa secara *automatic* dia berbunyi gitu loh. Sehingga tidak mengandalkan, iya, ini kan belum tentu orangnya ada, kalau nggak ada siapa yang mau mencet.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Ya.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Ya kan, coba Ibu coba dipikirkan lagi saya jadi ini, *nggih*.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Ibu betul sekali.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ketua Ketua Ketua, terus terang saya ngantuk. Sebetulnya kan ini menjawab tapi kok terus kembali seperti diskusi, ini *mbok* lain kali kalau begitu

khusus BMKG itu dialami sampai dalam sampai sedalam. Ini yang nunggu aja ngantuk ini.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Iya, *nuwun sewu* Romo.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Tadi ada pertanyaan nggak anu itu, mohon maaf kita itu sudah.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Nuwun sewu, Bapak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ndak, ini saya untuk semua aja, saya setengah protes, Pak Ketua, tolong ini kan jawaban, lalu tidak *sawur manuk*, kalau memang tidak puas adakan lagi. Yang seperti saya itu nunggu 3 jam hanya untuk orang lalu lintas bicara aja, PU aja nggak se sedalam ini.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, itu, Pak Djadi, Pak Djadi tidak ngantuk itu, Pimpinan, nggak ngantuk itu beliaunya, bicara itu.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi gini jadi gini.

Ya ruangan ini siapapun bebas bicara silakan ya, itu hukumnya. Tadi kan saya sudah bilang BMKG ini akan kita dalam, kan sudah ngomong dari tadi. Kalau saya *ndak* salah kata-kata tadi udah keluar kan. Nah, tapi terkait yang ini tadi memang, Bu, Ibu mesti kasih jelas ini. Kalau nunggu orang hadir dulu mencet itu barang, berapa banyak orang-orang udah mati, Bu, begitu loh.

Nah ini apakah begitu gitu loh, makanya ditanyain. Kalau begitu ya jangan gitu loh, Bu, hari gini gitu loh, masa nggak ada yang lebih cepat. Kan simpel aja Ibu jawabnya jangan terlalu panjang akhirnya panjang jadinya, Pak Djadi udah ngantuk Bu, jawabnya singkat-singkat aja ya.

Silakan, Bu, silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya mungkin sudah cukup, Bu?

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Terima kasih, ya, terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sudah cukup, Bu, sudah cukup, karena ini nanti sangat teknis.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Oh ya, iya ya, tapi bagaimana, harus menjawab atau meneruskan, saya mohon izin mohon arahan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Cukup, sudah cukup.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Sudah cukup *nggih*, iya terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Nanti kita dalam lagi.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Nggih, terima kasih sekali.

Ya, jadi akhirnya Toa itu kami apa meminta Pemerintah Daerah untuk menyiapkan sesuai dengan aturannya.

KETUA RAPAT:

Ya nanti kami bicarakan lagi, Bu.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Nggih.

Kemudian mungkin sebageian besar sudah *nggih*. Saya rasa yang penting-penting *sampun* ya, Pak, ya.

Oh iya ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Di *slide* nomor ini 20, Ibu, *nuwun sewu* tadi yang bertanya Ibu Sri Rahayu *nggih mbok menawi*, siapa ya? Di situ ada pertanyaan, oh, Ibu Restu yang bertanya tadi Ibu Restu. Kenapa untuk ini di *slide* nomor 20, untuk dukungan manajemen kok bisa ada

kelebihan 77 Miliar. Nah, ini sebetulnya perubahan mekanisme penganggaran yang sebelumnya uang 77 itu masuk di Poin Nomor 1.

Jadi, di program MKG yaitu anggaran untuk daerah-daerah untuk UPT-UPT. Jadi sistem penganggaran sebelumnya di MKG namun mulai tahun, tahun ini ya, bahkan Tahun 2022 ini, itu dikeluarkan dipindahkan ke dukungan manajemen sehingga seakan-akan ada penambahan demikian.

Saya rasa demikian Ibu Bapak, terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, *matur nuwun*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, salam Dapil dari Pak Sudjadi.

Silakan.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN.):

Nggih siap siap terima kasih.

Terima kasih, Bapak Pimpinan, Ketua Sidang, atau Rapat RDP ini,

Izin kami menjawab, kami akan rangkum jawaban. Ini jawaban dari Pak Bob tadi, kemudian Ibu Cen, dan mungkin ada Pak Sudewo. Jadi, saya rangkum tentang masalah menyangkut anggaran perawatan dan kemudian nanti Pak Sudjadi adalah Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, dan terakhir mungkin nanti Renstra, Pak, bagi tiga saja supaya lebih praktis, Pak.

Ya izin saya menjawab masalah anggaran pemeliharaan dan ini menyangkut tadi, Bu Cen, menanyakan trik-triknya bagaimana dengan anggaran yang kecil ini tapi bisa menjalankan.

Yang pertama, saya harus bicara menyampaikan secara.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Interupsi, Bu Cen nggak ada, Pak, nolah noleh ke sana ya.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN.):

Siap, tapi saya yakin ini direkam mungkin, Bu Cen.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kalau Anggotanya tidak ada di ruangan, Pak dilewatkan saja.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Siap, saya akan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kecuali nanti Beliau masuk.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Siap.

Jadi ini Pak Bob juga ada masalah anggaran, bagaimana kenapa besar anggaran pemeliharaan untuk dikurangi. Saya akan menjelaskan Bapak, bahwa Basarnas ini dulu terlahir dari IKO dan tuntutan IMO, ini perlu didasari.

Kenapa? Organisasi penerbangan dan pelayaran ini wajib didukung oleh adanya *search and rescue*, itu dulu dan itu adalah peralatan. Kami terus terang Pak, kami juga merasa berat memiliki, harus memenuhi kebutuhan itu terutama memelihara helikopter. Helikopter ini alutsista yang boleh kata paling mahal, habisnya di situ Pak.

Kemudian demikian juga kapal. Ini adalah syarat mutlak dari diakuinya suatu badan SAR suatu negara. Kemudian, saya jelaskan lagi bahwa helikopter yang kita miliki ini pun kami harus dituntut untuk pemenuhan mendukung kebutuhan pariwisata lima destinasi utama, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Bagaimana kami mencari solusinya, kalau anggaran kami ini terasa besar, mohon juga mungkin bisa dilihat bahwa saya pastikan tahun ini Basarnas bertambah kekuatan helikopternya tiga.

Dari mana? Dari mana Pak? Ini dari helikopter yang akan dihapuskan. Dananya dari mana? Saya carikan dari dana sisa-sisa anggaran. Jadi tahun ini bertambah tiga Bolcow kita hidup lagi, yang tadinya ini adalah *missed management*. Jadi, tadi kalau saya mau menjelaskan kepada Bu Cen, ini manajemen yang kita perbaiki, Pak. Yang pertama adalah sistem pengadaannya, kemudian kita fokus kepada perbaikannya, kemudian.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Jadi yang dimaksud heli yang di hapuskan itu yang bagaimana, Pak, dan kondisinya seperti apa.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Izin Pak, oh siap.

Jadi helikopter ini sudah empat tahun tidak beroperasi, Pak, dan diusulkan untuk di hapus. Saya karena mengetahui bahwa kebutuhan helikopter kita.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Apa namanya, punya Kementerian lembaga apa Pak?

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Mohon izin?

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Yang 3 itu.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Basarnas, Pak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Dari Basarnas sendiri?

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Iya.

Tidak berfungsi, Bu, jadi ini ada *missed management* helikopter ini, helikopter ini dijadikan kanibal. Jadi alatnya diambil satu satu satu satu, akhirnya tiga pesawat kita kosong. Kemudian saya kejar karena helikopter *Bolkow* ini kita masih memiliki, kenapa harus dihapus.

Saya hidup di Angkatan Udara jadi tahu betul, Bu, permasalahan ini. Saya kejar itu dan saya putuskan untuk dihidupkan. Semua bawahan saya tidak memikirkan, Bu, anggaran darimana, tapi saya berorientasi untuk *can do* gitu Bu, artinya *iso* gitu, bisa saya kerjakan. Dan *Alhamdulillah* kami bisa mengumpulkan dana kurang lebih 60 Miliar lewat itu, salah satunya menghidupkan helikopter ini.

Dan tahun ini yakin saya, Pak, dua, *eh* tiga pesawat di pertengahan tahun sudah akan bisa beroperasi. Ini karena saya tuntutan dari Pemerintah juga untuk bisa menghidupkan tuntutan helikopter, kenapa, ini adalah syarat, Pak. Helikopter itu harus dipunyai IKO, tadi sudah saya sampaikan peringkat kita di Asia Pasifik ke-3 setelah Amerika dan Singapura.

Tambah lagi Bu, tadi Bu MKG sudah menyampaikan FIR kita ini dibuka Bu, jalur dari Natuna yang dulunya mulai Batam, Bu, ya gitu ya Natuna, itu dulu di *back up* Singapura, Bu, helikopter harus *stand by* nanti nunggu di sana. Kalau kami tidak mempersiapkan dari sekarang, saya tidak mengharapkan terus terang saya abaikan minta kepada Pemerintah tapi saya untuk bisa berusaha ya.

Insy Allah, Pak, Angkatan Darat juga akan, kemarin saya mendengar berita Angkatan Darat akan menghapus atau menghibahkan helikopternya sebanyak tujuh dan ini sudah langsung kami respon. Saya langsung berhubungan dengan Kemhan kemudian kepada Panglima TNI.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pak, Pimpinan, izin melakukan pedalaman.

Cara yang akan dilakukan oleh Kepala Basarnas dengan niat yang sangat bagus itu baik sekali tetapi apakah dengan cara tersebut kira-kira memenuhi unsur peraturan perundang-undangan atau tidak? Jangan sampai dengan satu rekayasa yang dilakukan oleh Kepala Basarnas terkumpul uang 60 Miliar sekian, kemudian bisa menyelamatkan tiga helikopter yang sudah 4 tahun *idle* yang konon katanya itu menjadi kanibal, kemudian heli tersebut diselamatkan. Itu adalah niat yang baik dan diwujudkan secara nyata. Tetapi coba dipikir apakah ini memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak? Karena banyak sekali.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Saya jawab, Pak, saya jawab, Pak, izin.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya juga mau *nganu* nambah lagi nanti, Pak Kepala Basarnas. Saya kan hanya mengingatkan bukan berarti menyalahkan ya, kalau memang itu nanti tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan tidak jadi masalah, itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan oleh Kepala Basarnas ini sebenarnya soal Natuna. Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat strategis. Tidak hanya Basarnas pertimbangannya tetapi suatu negara, karena di sana ada satu persoalan dalam tanda kutip soal laut China Selatan gitu ya. Kalau sudah terkait dengan Laut Cina Selatan berarti terkait dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau terkait dengan kedaulatan negara

kesatuan Republik Indonesia itu bukan hanya tugas Basarnas saja, itu tugas negara.

Jadi, andaikata Kepala Basarnas menjelaskan ini dari awal dalam Pagu Indikatif ini dimunculkan tentu dari Banggar Pak Hamka dan kawan-kawan, kami dari Komisi V itu pasti akan memperjuangkan sekuat tenaga apa yang direncanakan untuk dibelanjakan helikopter dalam rangka kepentingan kedaulatan negara itu akan terpenuhi, itu ya.

Jadi, saya hanya mengingatkan, barangkali ini masih cukup waktu. Jangan berharap dari Angkatan Udara nanti akan demikian, demikian, tapi menjadi satu strategi internal dari Basarnas untuk dibelanjakan karena ini kepentingan negara.

Saya kira itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan, supaya tidak ngantuk, saya punya cerita.

Festival gajah sedunia, bagaimana gajah itu bisa menangis. Ternyata hanya gajah Indonesia yang bisa menangis, gajah Amerika semuanya datang, kenapa kamu bisa menangis, kami tidak bisa menangis. Kami menangis karena banyaknya helikopter dan pesawat tempur Indonesia yang jatuh, kesian para pilotnya itu.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah menegaskan untuk tidak lagi membeli yang bekas. Jadi ini saya ingatkan, Pak, ini perintah Presiden. Saya mantan Komisi I, jadi tolong Bapak jangan, kalau mau beli, beli yang baru aja jangan bekas itu nanti gajah menangis semua di Indonesia, Pak, terima kasih.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Siap, Pak, saya jelaskan, Pak.

Jadi mohon maaf, Pak, saya memimpin Basarnas mulai bulan Februari. Artinya saya tidak mengikuti perencanaan tetapi saya sudah bisa memprediksi anggaran yang saya save kan, tadi. Kemudian, saya berkonsultasi juga dengan BPK dan juga tim saya. Bagaimana, seperti yang ditanyakan Pak Sadewa tadi, tidak melanggar aturan perundang-undangan dan kita merubah ya kita ajukan kepada revisi dan itu disetujui, Bapak. Jadi *alhamdulillah* hal itu juga kami perhitungkan semua, mudah-mudahan upaya kami ini tidak sia-sia.

Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak Ketua masalah pesawat untuk heli. Heli kita itu sebenarnya ada, Pak, masih ada tiga lagi yang

operasional, Pak. Jadi helikopter yang operasional ini masih layak diterbangkan dan usia helikopter kita ini beda dengan helikopter yang lain. Jadi kalau saya melihat, sebetulnya bukan pesawat ini tua tetapi memang sistem perawatannya yang keliru.

Saya mendapatkan selama ini Basarnas hanya bergantung kepada mitra-mitra swasta yang menawarkan perawatan. Jadi, semua anggaran itu seolah-olah yang mengatur adalah mitra tersebut tanpa ada *background* bagaimana merawat yang benar, sehingga anggarannya lebih besar. Nah, dari situlah, Bapak, kami bisa *save money*.

Mohon maaf ini sebetulnya saya mau bilang *off the record* sebetulnya. Saya bisa menghemat dari angka 100 jam yang biasanya itu 6 sampai 7 bahkan 9 Miliar, saya bisa tekan sampai 2,5 Pak. Ini kenapa, karena kejelian kita dan saya ajak Tim saya untuk benar-benar mengetahui dengan jeli apa sih yang diperbaiki. Jadi kita tahu betul bagaimana manajemen penerbangan apa merawat pesawat ini.

Demikian juga kapal, Bapak, kapal kita tahun ini mau di rencanakan 17 kapal perawatan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Yang ditanyakan saja, Pak, yang dijawab supaya.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Iya betul, Pak, ini saya supaya, mohon izin, Bapak, mohon maaf saya jawab, supaya tahu bagaimana kami merawat untuk kesiapsiagaan tadi jawaban Bu Cen dan Pak Bob tadi begitu.

Kapal kita yang tahun ini 17, begitu kami dalami dan *stripping* yang benar, manajemen yang benar, tidak hanya sekedar laporan mengajukan kapal ini sekian tapi mitra harus datang dan kami tidak menanggung apakah mitra itu *stripping* nya diganti atau tidak, mereka berlomba. Dan, kita dapatkan dari 17 kita bisa mendapatkan 26 kapal yang diperbaiki, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Bapak yang dari Lampung tadi.

Kapal itu sebetulnya ditargetkan untuk dihapus, Pak, ya dan itu Kapal Drupala Pak, Drupada. 5 Miliar minimum untuk perawatan, untuk di hidupkan kembali. Kemudian setelah di *striping* yang benar kapal tersebut dan juga melakukan kapal yang, menyeleksi mesin, sekarang kapal itu hanya butuh tadinya cuman 1,7 Pak, kemudian naik lagi menjadi 2,1 saya setuju, kenapa, karena kita membeli *engine* peralatan, kalau di mobil itu *accu*, Pak, itu yang agak mahal.

Kapal yang tadinya cuman 7 knot berlayar, sekarang sudah bisa 16 dan ternyata kapal itu laik dan paling bagus. Nah, ini karena apa Pak, ini ada adanya hanya terima laporan saja dari mitra langsung ditelan tidak langsung itu. Nah,

ini yang harus saya kejar, beginilah cara ini menjawab semuanya. Saya *manage* peralatan saya, semua karena tuntutan tadi itu Pak IKO dan IMO tadi, yang ini harus saya penuhi.

Saya kemarin pergi ke Jenewa, saya itu bukan dapat teguran, Pak. Indonesia bagus Indonesia bagus dalam SAR nya *manage*, *but* ada satu hal. Kamu tidak memiliki *ocean ship*, ya, *ocean going ship*, dan ini fakta, Pak. Oleh karena itu, kapal-kapal yang akan dipesan ataupun yang didapatkan, saya minta yang cepat dan mampu di *stage 5*, Pak, artinya *stage 5* itu 3 sampai 5 meter. Jadi untuk yang Maluku, Aceh, sampai Kupang itu akan bisa *tercover* Pak dan kita akan semakin meningkatkan *grade* kita di mata internasional.

Saya mendemakan ketika berdiskusi di sana selalu, SAR itu adalah mata atau indikator suatu negara, itu tadi ada yang begitu menyampaikan dan ini yang kami kejar, Pak. Jadi beginilah yang kami sampaikan, bagaimana cara merawat, kenapa anggarannya besar, kok tidak bisa dikurangi. Kami tidak, Pak, anggaran tetap segitu, tetapi hasil yang tadinya tadi saya bilang 17, sekarang bisa 26, saya tambah 9 dengan anggaran yang sama, yang Pagu. Ini karena apa, sisanya manajemennya dan kami melakukan perubahan, saya minta kepada tim saya juga untuk jangan sampai ada temuan dan kami juga berkonsultasi dengan BPK. Kami mulai sedikit walaupun terjadi masih temuan-temuan dan lain sebagainya.

Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan masalah perawatan dan bagaimana cara me, ini, dan mohon maaf Bapak ada berbagai daerah yang sampai sekarang belum *ter-cover*, kenapa kita membeli kapal itu, kapal itu, kapal itu, itu bagian dari Renstra yang belum terpenuhi, Bapak.

Kalimantan Selatan Tenggara kemarin kami berkunjung, itu yang di, Hulu Pak, yang tidak tertangani yang orang tenggelam ndak mampu, Pak, karena memang kapal kita tidak mencukupi, nah ini kenapa itu terjawab juga tadi dari Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian untuk pendidikan, Pak Sudjadi dan mungkin juga Pak Sudewo tentang pelatihan. Kami akan tetap anggarkan Pak, kami akan upayakan tahun ini juga paham, inilah tahun-tahun Bapak juga. Kami akan upayakan ya mudah-mudahan kami akan bisa sedikit tidak mengurangi lah, Pak. Baru saja seminggu ini kami yang anggaran sudah minim dikurangi lagi *refocusing* dapat 112 Miliar. Saya bingung, Pak, mau mau motong yang mana, ya, tapi tetep kami upayakan, Pak, mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan Bapak sekalian untuk Dapil-Dapil yang yang diinginkan.

Ini masalah sumber daya manusia atau potensi SAR, yang terakhir adalah mungkin masalah Renstra. Kami sama dengan Ibu, tadi 2020-2024 sudah kami tayangkan juga dan sudah dibilang kami saat ini mengikuti Renstra, Bapak. Renstra kita tidak bisa terpenuhi lantaran adanya Covid dan ini mengganggu semuanya, Pak. Dengan demikian, tuntutan tidak bisa terpenuhi.

Saya kira itu, Pak, secara singkat dan mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Bapak Ibu sekalian ingin ketahui bagaimana kami susunan tadi dan

kalau masalah anggaran 1,7 Pak, terus terang rencana kami untuk adanya pengelolaan saat ini sudah mepet. Tadi Pak Sudewo menginginkan apakah di *resize* atau nggak.

Satu lagi saya jawab dari Pak Dewo, perencanaan saya belajar dari *feedback*, Pak. Yang pertama kejadian Nanggala, kejadian puting beliung Seroja, kapal saya tidak bisa, Pak, saya perintahkan dari Kupang untuk ke Flores tidak mampu, alasannya ombaknya masih besar gitu. Makanya saya kembalikan lagi, saya harus membeli kapal yang mampu *save stage 5*, kapal kecil tapi *stage 5*.

Kemudian, Nanggala, kejadian Nanggala kapal selam. Mohon maaf sekali lagi Pak, kapal Basarnas hanya 600 meter, Pak. Sekarang kami buat bisa 1000 meter bahkan dari 1000 meter plus lagi dia sampai 1000 meter lagi untuk ROV nya. Jadi ROV tidak dimasukkan dia menyelam tapi diturunkan seperti timba, dari timba ini baru dia keluar. Ini sebuah inovasi yang kami ciptakan, mohon dukungannya, satu lagi nanti adalah saya hanya memikirkan, Pak, mudah-mudahan tidak terjadi ada kapal tenggelam, ada manusia masih ada hidup di dalam kapal.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Mungkin yang singkat-singkat saja, Pak.

KEPALA BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN):

Ya itu saja, jadi saya ingin menjelaskan seperti itu bagaimana kita inovasi sebuah yang minim menjadi yang wah, Pak, dan mudah-mudahan tidak dikurangi, mohon dukungannya dari Bapak sekalian untuk bisa meningkatkan apa anggaran kami.

Demikian, mohon maaf, Pak, apabila ada kurang dan lebih ada silap kata, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Ketua dan para Anggota, yang terhormat,

Sampailah kita pada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V pada hari ini, mohon ditayangkan.

Selasa, 31 Mei 2022:

Nomor 1, Komisi V DPR RI memahami paparan tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas sesuai surat

bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-353/MK.02/2022 dan Nomor B-301/M/PPN/D.8/PP.04.024/04/2022, Hal: Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

- 1) Lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pagu Indikatif Rp3.010.572.747.000,-

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

- 2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, ini yang nomenklaturnya yang BNPP atau, BNPP ya ditambah ya, *garis miring* BNPP, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Rp1.752.231.284.000,-

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 di DPR RI.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kedua, Komisi V DPR RI sepakat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas untuk menyesuaikan alokasi Pagu anggaran belanja dalam menyusun program dan kegiatan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kembali ke poin 1, Komisi V akan memperjuangkan peningkatan anggaran, konkritnya apa dan mitra ini, Pemerintah ini, ada nggak satu program yang memang menginginkan Komisi V untuk memperjuangkan program-program tertentu supaya anggarannya naik, kan nggak ada, gitu ya. Jadi jangan ditarik suatu kesimpulan menjadi sebuah komitmen Komisi V, begitu loh, jadi tidak perlu, ada kata selanjutnya itu tidak perlu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Betul kata Pak Sudewo karena di dalam sini Bapak tidak mau menyampaikan apa namanya permintaan tambahan anggaran. Kalau tidak ada apa-apa kemudian kita yang ingin meningkatkan anggaran.

KETUA RAPAT:

Ini jadi begini, saya coba tengahi dulu. Ini jadi begini, kita ini kan masih nanti kan Pak Hamka kan di Badan Anggaran toh. Nah, sekarang kan posisinya Pagu Indikatif, Pak, nanti dari Pagu Indikatif ini biasanya nanti kan ada tahap kedua kalau nggak salah, Pak Hamka ya.

Biasanya tuh ada optimalisasi di Badan Anggaran, Pak. Nah waktu optimalisasi ini memungkinkan sebetulnya untuk terjadi penambahan. Misalnya pemerintah mengajukan sekarang *lifting* nya sekian tapi Banggar mintanya sekian, penerimaan pajak sekian oleh Banggar didorong nanti sekian, gitu loh.

Nah, kemudian ada banyak lah indikator di sana yang bisa memungkinkan gituloh ajuan Pemerintah ini untuk berubah. Termasuk juga ketika defisit, defisit misalnya sekarang berapa persen, nanti berubah jadi sekian persen setelah disepakati Badan Anggaran. Akhirnya di Banggar kan ada stok, stok biaya gitu loh, stok-stok pendanaan APBN.

Nah, itu memungkinkan untuk terjadi penambahan. Ya kalau memperjuangkan untuk supaya ditambah bisa bisa saja teman-teman di Banggar di Komisi V kan ada, itu sebetulnya normatif itu. Nah, jangan kita tutup menurut saya keran ini, Pak Hamka, di ini kan nanti kita dorong kesimpulan ini ke Badan Anggaran di tanggal 10, 10 nanti.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, kalau begitu begini, di tambah kalimat untuk menutup *backlog* gitu ya.

KETUA RAPAT:

Ditambahkan untuk menutup *backlog*. Apalagi Basarnas, Pak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Udah, setuju ya yang nomor 1.

(RAPAT: SETUJU)

Yang nomor 2 Komisi V DPR RI sepakat dengan Badan Meteorologi.

Silakan.

PESERTA RAPAT:

(suara kurang jelas).

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, mungkin saya *nganu*, untuk menutup *backlog* terhadap program-program prioritas nasional, terhadap aja, terhadap program-program prioritas nasional dan seterusnya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Udah diketok tadi, ya.

Kemudian yang kedua, Komisi V DPR RI sepakat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran Belanja dalam Penyusunan Program dan Kegiatan RKA K/L RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2023 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan pembangunan-pembangunan berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3.

Setuju? Pak Sudjadi setuju, ya?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan, Pimpinan, izin. Tadikan sudah mengusulkan untuk memperjuangkan yang poin 1 itu. Kemudian kalau ada usulan poin 2, apakah memang nanti akan diarahkan juga ke sana? Artinya program-program yang belum masuk di dalam poin 1, memungkinkan ndak kira-kira seperti itu, makasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebenarnya begini ya, ini kan di Badan Anggaran sedang dibicarakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebelum nanti *Insya Allah* tanggal 16 Agustus, Presiden akan menyampaikan pengantar nota keuangan dihadapan DPR Republik Indonesia setiap tahun. Nah, memang optimalisasi itu biasanya setelah pengantar nota keuangan tapi, Pak Ketua, terakhir saya di Badan Anggaran bahwa jika di dalam pemberian pendahuluan ini sudah terdapat potensi keuangan negara untuk memiliki penerimaan yang lebih, maka ini bisa ditingkatkan Pagu Anggaran ini di pengantar nota keuangan Presiden.

Setelah tentunya Badan Anggaran menerima surat dari Komisi terkait, hal ini Komisi V kepada Badan Anggaran, ya, akan kita sampaikan paling lambat 10 siklusnya 10 Mei, ya, eh 10 Juni, 10 Juni. Jadi mesti, mesti memberi ruang kepada kita semua untuk penambahan peningkatan kemungkinan penambahan anggaran, gitu Bu Sri.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Kalau begitu jangan, jangan kalimatnya untuk menyesuaikan begitu, untuk mengalokasikan atau memberi atau istilahnya ada alokasi Pagu Anggaran untuk itu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya ini kan Bu dia punya anggaran cuman sekian, nanti disesuaikan lah.

KETUA RAPAT:

Kalau ada tambahan di sesuaikan. *Its oke* sih kalau menurut saya, *its oke*. Ya, ya, sesuaikan kalau ada, kalau ada, itu tanya Pak Hamka lah itu.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau memang dalam hati mengatakan kalau ada, ya ditulis saja, kalau ada, ya kan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya ini maksud beliau apa namanya kita.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Ya memang bahasanya bahasanya begitu, jangan poin 2 ini kemudian seolah-olah mengikat mitra, ya untuk menyesuaikan hasil kunjungan kerja kita, tetapi kalau memang tidak ada tambahan apa yang harus disesuaikan, jadi harus gamblang kalimatnya kalau memang, kalau ada, begitu kan itu. Jadi maksud hati memeluk gunung, gitu kan, apa daya tangan tak sampai. Itu kayaknya juga sesuatu yang nggak mungkin tapi juga disampaikan saja tulis saja.

KETUA RAPAT:

Ini-ini cukuplah ini, ini cukuplah ini, cukuplah ini Mas nggak perlu ditambah lagi, kayaknya kurang kopi aja ini, cukuplah ini, ya udah.

(RAPAT: SETUJU)

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Cuma dua kesimpulan kita.

KETUA RAPAT:

Bapak Ketua, saya sebentar.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya silakan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, teman-teman sekalian, kesimpulan rapat sudah diketok. Tanya dulu Pemerintah, Pak, setuju nggak, Pak, setuju ya? Baik.

Nah, kalau Pemerintah udah setuju, ini kita mau serahkan anu ini, Pak nyerahkan hasil Kunjungan Kerja Komisi V ya Bidang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan BMKG nanti akan kita serahkan secara langsung, saya minta Kepala Basarnas dan Kepala BMKG bersama kita Pimpinan kita ke depan untuk menyerahkan ini secara resmi.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau boleh ngomong lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kasih kopi, dia tuh.

F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, yang di samping kanan Kepala Basarnas, kok beda orang nih, belum kenal saya. Pak Haris, jadi Sestama? Oh.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.)/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Bapak Ibu sekalian, demikianlah rapat kita pada hari ini. Dengan Puji Tuhan mengucapkan *alhamdulillah*, rapat pada hari ini dinyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

JAKARTA, 31 Mei 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002